

**PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM *SOVEREIGN WEALTH FUND*  
NORWEGIA TERHADAP *CLIMATE RISK* DI EROPA BARAT**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun Oleh:

YUSRIL

E061191118

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**SKRIPSI**  
**PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM *SOVEREIGN WEALTH FUND***  
**NORWEGIA TERHADAP *CLIMATE RISK* DI EROPA BARAT**

Disusun Oleh:

YUSRIL

E061191118

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM SOVEREIGN WEALTH  
FUND NORWEGIA TERHADAP CLIMATE RISK DI EROPA  
BARAT

N A M A : YUSRIL

N I M : E061191118

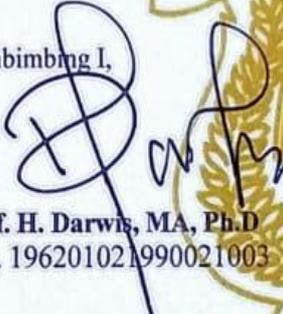
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

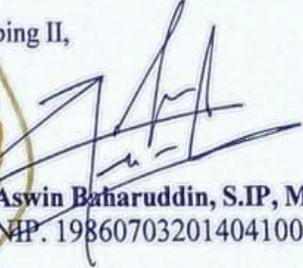
Makassar, 6 Maret 2024



Pembimbing I,

  
Prof. H. Darwis, MA, Ph.D  
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM SOVEREIGN WEALTH FUND NORWEGIA TERHADAP CLIMATE RISK DI EROPA BARAT

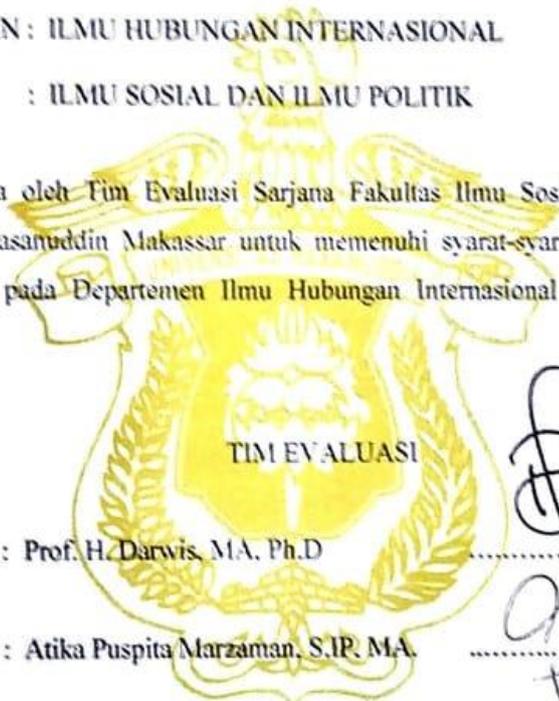
NAMA : YUSRIL

NIM : E061191118

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 4 Maret 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

*[Handwritten signatures of Prof. H. Darwis, Atika Puspita Marzaman, Ishaq Rahman, Aswin Baharuddin, and Nurjannah Abdullah]*

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusril  
NIM : E061191118  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : SI

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

### **PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM SOVEREIGN WEALTH FUND NORWEGIA TERHADAP CLIMATE RISK DI EROPA BARAT**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain kecuali kutipan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Maret 2024

Yang Menyatakan



(Yusril)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan anugerah - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **Pengaruh Kebijakan Program *Sovereign Wealth Fund* Norwegia Terhadap *Climate Risk* di Eropa Barat** " yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin . Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , baik terkait substansi maupun penulisannya . Kendati demikian , penulis tetap berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional dan menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak - pihak yang memiliki ketertarikan terhadap pendekatan normatif dalam kerangka teori konstruktivis , khususnya pendekatan *norm life cycle*. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak . Oleh karena itu , penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Ibu tercinta **Hj. Nukrah dan Alm. H. Sirajuddin** serta **Kak John dan Citra** yang senantiasa memberi doa , semangat , dukungan, motivasi ;
2. Bapak **Prof. Dr. Ir . Jamaluddin Jompa , M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya ;
3. Bapak **Prof. Dr. phil . Sukri Tamma , M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Universitas Hasanuddin beserta jajarannya ;
4. Bapak **Prof. H. Darwis , MA , Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin serta sebagai Pembimbing pertama;

5. Kak **Aswin Baharuddin , S. IP , MA** selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini berhasil diselesaikan ;
6. Seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin ;
7. Terimakasih sobat PKM PM Bira Guide telah menjadi wadah untuk mengasah . kemampuan dan mengembangkan diri dalam pengabdian masyarakat terutama skill menulis dan skill mengajar bahasa Inggris deh beban sekali ka disitu;
8. Sahabat - sahabat Pijal (Pigi Jalan) **Syefa, Yudis, Havids, Ciko, Sopi, Putri**, semoga jalan-jalan sampai nanti di luar negeri;
9. Anjrot Group **Edho, Asrafiya, Taqdir, Syahrul, Hikmah, Febi** adakan dulue magacara palekko dirumahnya bu febs;
10. Anak Maniezt **Habul, Iccang, Iqbal, Abdi** telah menemani dan saling membantu di kegiatan magang meskipun datang ji maccala anak-anaka tapi sangat berkesan btw kurangi kasian begituan karena ada azabnya,
11. Sobat Perpus Pasca **Adetry, Maya, Fitri, Ismah, Firah**, telah membantu dan jalannya mulai dari ketaman kayu-kayunya Unhas sama kulinernya di Unhas meskipun saya ji tunjukkan ki semua, sama spesial thanks mamanya adetry tawwaa nakasika palekko untuk puasa Kamis sama kerupuk setelah Semhas walaupun kukasi lagi ke temana adetry deh merasa bersalah sekalika;

12. KKN 108 PS Sidrap **Umni, Mallo, Tuti, Indah, Hikmah, Tasya, Fiqar, Zuba** telah membantu banyak di Compong serta kenangan manis di setiap dusun terutama saya sangat berterima kasih kepada **Pak Anto (Bang Tato) dan Bu Anti** untuk rumahnya walaupun nabilang dikasi inap jeki di rumahnya orang;
13. **Reza Febriasyah adad** (nama yang natulis pak ridho) telah menemani penulis sepanjang perjalanan kuliah, sebagai teman makan, kekampus, main PS walaupun dikalah terush di NBA 2K14 pesan ku ca kerja mi cepat skripsi nuh, sama ketemuno cepat pak ishaq
14. Teman - teman HI Angkatan 2019 terima kasih dukungan dan bantuannya berkat kalian semua saya dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin ini.

Makassar, 13 Maret 2024

Yusril

## ABSTRAK

Yusril, E061191118, “**PENGARUH PROGRAM SOVEREIGN WEALTH FUND NORWEGIA TERHADAP CLIMATE RISK DI EROPA BARAT**”, di bawah bimbingan Prof. H. Darwis, MA, Ph.d selaku pembimbing pertama dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing kedua, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kebijakan GPFNG Norwegia terhadap penanganan *climate risk* di Eropa Barat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) data yang digunakan bersumber dari publikasi dan literatur dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Pendekatan ini digunakan yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendapat hasil penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian digunakan untuk memahami cara dan pengaruh GPFNG dalam penanganan *climate risk* di Eropa Barat serta tantangan penanganan *climate risk*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *norms life cycle* terutama di tahap kedua yaitu *norms cascade*. Penelitian ini menggunakan menganalisis terkait bagaimana norma penurunan emisi gas yang diterima oleh Norwegia yang di institusionalisasi di GPFNG Norwegia sehingga digunakan dalam pembuatan kebijakan investasi di SWF Norwegia dalam penanganan *climate risk* di Eropa Barat. Kemudian penelitian ini juga menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh GPFNG dalam menginternalisasi norma penurunan emisi gas ke perusahaan portofolionya untuk mengatasi *climate risk* di Eropa Barat.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa GPFNG Norwegia berupaya sebagai *norm entrepreneurship* untuk mendorong perusahaan untuk menangani *climate risk*. Melalui kebijakan *responsible investment* yang mereka terapkan setelah menerima norma penurunan emisi gas. Melalui kebijakan investasinya GPFNG mempengaruhi perusahaan untuk berkomitmen untuk menurunkan emisi gas dan melaporkan risiko aktivitas bisnis perusahaan. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan adalah internalisasi norma dengan kepentingan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan permasalahan ketergantungan perusahaan.

**Kata Kunci:** *Sovereign Wealth Fund, Climate Risk, Norma Internasional, Kaskade Norma*

## ABSTRACT

Yusril, E061191118, "**THE INFLUENCE OF NORWEGIA'S SOVEREIGN WEALTH FUND PROGRAMME ON CLIMATE RISK IN WEST EUROPE**", under the guidance of Prof. H. Darwis, MA, Ph.d as the first supervisor and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as the second supervisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to explain the effect of Norway's GPFG policy on handling climate risk in Western Europe. This research uses the method of library study (library research) the data used are sourced from publications and literature using qualitative analysis. This approach is used, namely descriptive analysis which aims to get analytical descriptive research results. The results of the research are used to understand how and the influence of the GPFG in handling climate risk in Western Europe and the challenges of handling climate risk.

This research uses the norms life cycle approach, especially in the second stage, namely the norms cascade. This research uses analyses related to how the norms of gas emission reduction accepted by Norway are institutionalized in the Norwegian GPFG so that they are used in making investment policies in the Norwegian SWF in handling climate risk in Western Europe. Then this research also explains the challenges faced by the GPFG in internalizing the norms of reducing gas emissions to its portfolio companies to address climate risk in Western Europe.

The results of the study explain that the Norwegian GPFG endeavors as an entrepreneurial norm to encourage companies to address climate risk. Through the responsible investment policy that they implemented after receiving the norm of reducing gas emissions. Through its investment policy, GPFG influences companies to commit to reducing gas emissions and reporting the risks of the company's business activities. The challenge faced by the company is the internalization of the norm with the company's interest to get profit and the problem of company dependency.

**Keywords:** Sovereign Wealth Fund, Climate Risk, International Norms, Norm Cascade

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
a. <i>Sovereign Wealth Fund</i> .....	11
b. <i>Norms Life Cycle</i> .....	12
c. <i>Green Investment (GI)</i> .....	17
E. Metode Penelitian.....	21
a. Tipe Penelitian.....	21
b. Teknik Pengumpulan Data .....	21
c. Teknik dan Analisis Data .....	22
d. Metode Penulisan .....	22
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. <i>Sovereign Wealth Fund (SWF)</i> .....	23
B. <i>Norms Life Cycle</i> .....	27
a. <i>Emergence of Norms</i> (Perkembangan Norma).....	31
b. Titik Kritis Atau Ambang Batas.....	35
c. <i>Norms Cascade</i> (Penyebaran Norma) .....	36
d. <i>Norms Internalization</i> (Internalisasi Norma) .....	40
C. <i>GI (Green Investment)</i> .....	43
C. Penelitian Terdahulu terkait dengan SWF Norwegia dan <i>Climate risk</i> .....	51
BAB III .....	58

GAMBARAN UMUM .....	58
A. Implementasi Kebijakan Investasi GPFG .....	58
a. <i>Government Pension Fund Global</i> (GPFG).....	58
b. Implementasi Kebijakan Investasi GPFG .....	64
B. Permasalahan Penanganan <i>Climate risk</i> di Eropa Barat .....	73
a. Dampak <i>Climate risk</i> Transisi dan Fisik .....	74
b. Kebutuhan Investasi terhadap <i>Climate risk</i> di Eropa barat .....	77
BAB IV .....	81
PEMBAHASAN .....	81
A. Pengaruh Kebijakan GPFG untuk Penanganan <i>Climate Risk</i> di Eropa Barat	81
a. Kebijakan GPFG Untuk Menangani <i>Climate risk</i> di Eropa Barat .....	87
a. Pengaruh <i>Active Ownership</i> di Kebijakan Shell dan British Petroleum	91
b. Stigmatisasi perusahaan bahan bakar fosil melalui divestasi .....	94
c. Pengaruh Kebijakan GPFG terhadap Investasi di Bidang Infrastruktur Hijau di Eropa Barat.....	98
B. Tantangan Penerapan Kebijakan GPFG Menghadapi <i>Climate Risk</i> di Eropa Barat .....	103
BAB V.....	109
KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. KESIMPULAN .....	109
B. SARAN .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	21
Gambar 2 Klasifikasi SWF berdasarkan tujuan dan strategis	24
Gambar 3 <i>Stage Norms Life Cycle</i>	33
Gambar 4 Struktur Dana	59
Gambar 5 Transfer Dana GPFG	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Sovereign Wealth Fund* atau disingkat SWF merupakan dana kelola yang dimiliki oleh pemerintah yang bersumber dari surplus komoditas negara. Menurut *Peterson Institute* SWF adalah dana yang dimiliki oleh negara yang diinvestasikan dalam portofolio aset keuangan internasional yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan investasi jangka panjang untuk memaksimalkan kekayaan nasional (Truman, 2010). Jadi, Negara menjadikan SWF sebagai sarana investasi yang dibentuk dan dikelolanya sendiri untuk berbbagau kepentingan untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Tujuan pembentukan SWF relatif pada negara asal dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Misalnya, Norwegia membentuk SWF untuk menginvestasikan kelebihan pendapatan minyak dengan tujuan untuk memastikan kekayaan generasi mendatang. Sedangkan, negara berkembang lain menjadikan SWF sebagai dana stabilisasi untuk melindungi negaranya terhadap volatilitas mata uang dan menempatkan ketergantungan ekonomi mereka pada pendapatannya misalnya Uni Emirat Arab dan Venezuela. Maka dari itu pembentukan SWF tergantung kondisi dan tujuan dari suatu negara (Ouni, Bernard, & Plaisent, 2020).

SWF menjadi pemain penting di pasar keuangan internasional. Aset yang besar dan jumlah yang terus bertambah sehingga pengaruhnya menjadi signifikan. Pengaruh investasi SWF juga dapat meningkatkan tingkat risiko karena transaksi mereka dapat dimotivasi oleh tujuan politik dan bukan tujuan ekonomi (Ouni, Bernard, & Plaisent, 2020). Motivasi tersebut muncul karena investasinya dimiliki

dan dikendalikan oleh pemerintah dengan dana yang tidak memiliki penerima atau kewajiban di luar (di luar pemerintah atau warga negara secara abstrak) serta mereka menginvestasikan asetnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan kepentingan dan tujuan investor (Clark, 2013).

Dana Investasi SWF di investasikan langsung ke perusahaan terdaftar dan yang tidak terdaftar dengan membeli saham suatu perusahaan. Selain itu, SWF berinvestasi langsung di sektor tertentu seperti SWF Singapura yaitu Temasek yang berinvestasi langsung di infrastruktur serta SWF Norwegia yaitu GPF (Castelli & Scacciavillani, 2012). Dampak investasi SWF mempengaruhi keuangan global yaitu arus aset antar negara dan harga absolute dan relatif dari sebuah aset luar negeri. Dampak lainnya terhadap diversifikasi aset yang merupakan strategi yang mempengaruhi arus dana dari SWF dan dapat mempengaruhi aset mata uang dollar US dengan investasi di berbagai aset luar negeri (O'Brien et al., 2011).

SWF Norwegia atau dikenal dengan nama *Government Pension Fund Global* (GPF) menjadi dana kelola dengan kepemilikan modal besar di perusahaan dunia yang dimiliki secara formal oleh Kementerian Keuangan Norwegia (*Finansdepartement*) dan manajer operasionalnya yaitu Bank Sentral Norwegia (*Norges Bank*) (Norges Bank, 2019). Norwegia pertama kali menemukan minyak, di ladang Ekofisk, pada akhir tahun 1969. Produksi dimulai segera sesudahnya, pada tahun 1971 (Moses, Spencer, & Pereira, 2021). GPF telah menjadi SWF terbesar di dunia dengan perkiraan aset di bawah manajemen lebih dari US\$1,1 triliun atau setara dengan kurs 14,674.80 maka jika di rupiahkan sebesar 14,7 juta triliun dengan kepemilikan di lebih dari 9000 perusahaan dan mengendalikan setara

dengan 1,4% dari kapitalisasi pasar global (Ouni, Bernard, & Plaisent, 2020, hal. 374).

Sistem tata kelola diberikan oleh Parlemen (*Storting*). Pada Undang-Undang *Government Pension Fund Storting* memberikan tanggung jawab formal kepada Kementerian Keuangan (*Finansdepartement*) atas pengelolaan dana. Sedangkan pengelolaan operasional GPFG dilakukan oleh *Norges Bank (Styringsmodell Regjeringen.no, 2023)*. Selain itu, GPFG memiliki *Council on Ethics (Etikkradet)* yang memiliki tugas untuk mengevaluasi investasi Dana GPFG di perusahaan tertentu yang tidak sesuai dengan Pedoman Etisnya (*Ethical Guidelines*) (Council on Ethics, n.d.).

Strategi yang digunakan oleh manajemen GPFG yaitu *Norges Bank* adalah diversifikasi aset yang memberikan pendapatan yang stabil bagi dana. Melalui *Active Ownership* dengan kepemilikan saham di perusahaan membuat GPFG mendapatkan hak atas sebagian kecil dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Selain itu, GPFG menerima aliran pendapatan yang stabil dari pinjaman ke negara yaitu obligasi atau surat berharga negara dan perusahaan. Meskipun begitu, pendapatan dari GPFG sebagian besar diperoleh dengan berinvestasi di ekuitas, pendapatan tetap, *real estate*, dan infrastruktur energi terbarukan (Norges Bank, 2019).

Pengelolaan hasil sumber daya tak terbarukan yang terbatas merupakan fungsi dari GPFG. Fungsi ini muncul karena kekhawatiran, keterbatasan membuat setiap minyak, emas, atau berlian yang diambil dari tanah nantinya tidak akan tersedia untuk generasi mendatang jika tidak dimanfaatkan dengan efektif. Maka dari itu, Pemerintah Norwegia memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan bagi

generasi di masa depan dan sementara mereka tetap menggunakan sumber daya alamnya untuk memenuhi kepentingan di masa sekarang (Norges Bank, 2019).

Menurut penelitian Bhopal GPFG memiliki kepentingan di masa depan untuk menghadapi masalah *Climate Change* dengan mengikuti hasil Perjanjian Paris. Gerakan Norwegia untuk menjaga lingkungan dibantu oleh penyampaian publik untuk menghilangkan masalah politik. Norwegia berupaya untuk mengejar dekarbonisasi domestik serta tujuan global untuk mengurangi bencana perubahan iklim yang memiliki konsekuensi yang luas. Bukti dari kontribusi Norwegia yaitu keberhasilan menjadi yang terdepan dalam *Nationally Determined Contributions* (NDCs) (Bhopal, 2021). Maka dari itu, Dana ini digunakan untuk menghadapi masalah lingkungan dengan cara berinvestasi di perusahaan ataupun proyek yang memiliki misi untuk menghadapi perubahan iklim.

Perusahaan merupakan aktor yang berkontribusi pada perubahan iklim. Aktivitas sebuah perusahaan berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga perusahaan seharusnya menaruh perhatian terhadap perilakunya yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pengembalian dana dengan keuntungan bagi investor. Tujuan tersebut membuat GPFG berupaya untuk selaras dengan ekspektasi masyarakat. Maka dari itu, GPFG mengimplementasikan SRI (*Social Responsibility Investment*) yang menerapkan prinsip yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan pemerintah ESG (*Environmental, Social, and Government*) dengan mempublikasikan harapan jelas dari sebuah perusahaan yang diinvestasikannya serta mempertimbangkan kebijakan terutama untuk memenuhi kepentingan generasi di masa akan datang (Røste, 2021).

GPIF mendapat kritikan terutama oleh pergerakan divestasi bahan bakar fosil. Di tahun 2013 terjadi pergerakan divestasi di bahan bakar fosil. Pergerakan ini dimulai oleh Vermont Academic, McKibben, dan 350.Org. Kemudian terdapat Pergerakan *Do Math* merupakan kampanye dilaksanakan oleh McKibben yang bertujuan untuk divestasi industri bahan bakar fosil, dan kampanye *Go Fossil Free* (Rimmer, 2016). Pergerakan divestasi yang mengglobal dan beberapa dukungan oleh masyarakat internasional melalui deklarasi seperti *Declaration on Climate Change Justice*, dan dukungan beberapa figur mengenai divestasi perusahaan bahan bakar fosil membuat pemerintah Norwegia terdorong untuk merubah beberapa kebijakannya. Maka dari itu, di tahun 2014 GPIF mulai berinvestasi di energi terbarukan, dan mengevaluasi kembali perusahaan yang dikecualikan terutama di GPIF (Rimmer, 2016).

Akhirnya, Pada tahun 2015 '*Go Fossil Free*' yang merupakan kelompok kampanye global yang digagas oleh 350.Org telah mendorong Norwegia untuk divestasi di bahan bakar fosil. Memberikan pernyataan untuk berhenti untuk mendapatkan pendapatan dari perusahaan bahan bakar fosil. Pada tahun ini juga Norwegia menyepakati hasil *Paris Agreement* yang mengharuskan negara-negara untuk menurunkan emisi gasnya (Rimmer, 2016). Kebijakan yang digunakan oleh GPIF untuk mengatasi *climate risk* dan untuk menjalankan tuntutan dari kampanye divestasi bahan bakar fosil dan menyesuaikan dengan kesepakatan paris yaitu divestasi dan *active ownership*. Divestasi dan kepemilikan di perusahaan merupakan upaya yang dilakukan oleh GPIF untuk berkontribusi terhadap upaya mengkampanye perubahan iklim dan mengurangi keterlibatan dalam merusak lingkungan (Norges Bank Investment Management, 2023).

Pada tahun 2014, GPFG melakukan divestasi di 50 perusahaan batubara. Selain itu, dana juga memegang perusahaan minyak dan gas di 53 perusahaan dengan kepemilikan di 16 perusahaan US salah satunya *Peabody Energy* dan perusahaan puncak gunung *Arch Coal* dan *Alpha Natural Resources* dan 13 perusahaan India, serta tiga perusahaan batu bara China. Permasalahannya pada saat itu menurut Heffa Shueking yang merupakan NGO Urgewald menyatakan bahwa tindakan divestasi ini baik tetapi total investasi di batubara sangat sedikit (Holger, 2019). Berdasarkan proposal dari *Finansdepartment* GPFG memiliki sekitar 6% kepemilikannya dalam ekuitas bahan bakar fosil. Meskipun begitu, GPFG tidak menarik investasi dari perusahaan minyak besar, tetapi akan melakukan divestasi dari perusahaan eksplorasi dan produksi energi yang lebih kecil. Di tahun 2018 GPFG memiliki 341 perusahaan minyak dan gas di kepemilikannya dan saham terbesar berada di Amerika Serikat sebesar 31% (Holger, 2019)

GPFG memiliki tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan generasi mendatang untuk meningkatkan nilai dari GPFG serta mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di dana. Generasi mendatang mengharapkan nilai dana bertambah dan dimanfaatkan untuk menghadapi perubahan iklim yang dapat mengancam generasi mendatang (Bhopal, 2021, hal. 10). Seiring berjalannya waktu muncul tekanan yang diberikan oleh masyarakat membuat Pemerintah Norwegia memberikan laporan yang mengusulkan agar mendukung keputusan investasi di seluruh dana lebih fokus ke *climate change*. Terdapat bukti yang semakin mengkhawatirkan bahwa planet bumi semakin memanas jauh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya disertai dengan banyak perusahaan bahan bakar fosil di belakang pengembangan (Norges Bank, 2023).

Risiko iklim mengacu pada potensi dampak negatif yang muncul dari perubahan iklim dan konsekuensi yang terkait. Ini mencakup berbagai bahaya dan kerentanan yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, ekosistem, komunitas, dan ekonomi. Risiko iklim adalah hasil interaksi antara bahaya terkait iklim dan kerentanan sistem yang terpapar. Selain itu, *Finansdepartment* memberikan pandangan mengenai pemanasan global sebagai resiko keuangan yang kompleks. Maka dari itu, proses perubahan kebijakan kementerian akan melalui rekomendasi dari kelompok ahli dan keputusan apapun melalui *Storting* (Tarakden, 2021).

Menurut *Norges Bank* dampak iklim dapat mempengaruhi pengembalian perusahaan dan portofolio. Sehingga untuk mengurangi risiko iklim di masa depan dan meningkatkan peluang, dana memiliki kepentingan dalam transisi yang teratur serta sejalan dengan Perjanjian Paris. Berdasarkan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim yaitu *The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyimpulkan bahwa emisi karbon dioksida antropogenik global harus mencapai nol bersih pada tahun 2050 untuk membatasi sebesar 1,5 derajat C. Selain itu GPFG mendukung *Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD)* yang merupakan kerangka perjanjian internasional untuk pelaporan mengenai *climate risk* (Norges Bank Investment Management, 2018). Melalui, Kesepakatan paris maka Norma hasil dari Perjanjian Paris dapat mempengaruhi pemerintah Norwegia merubah kebijakannya terhadap perusahaan portofolionya.

Perubahan iklim berdampak pada lingkungan Eropa dan orang-orang dalam banyak hal. Peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, gelombang badai, kekeringan, dan banjir memiliki dampak yang paling signifikan. Kerugian ekonomi akibat cuaca dan iklim ekstrem di Eropa mencapai sekitar setengah triliun euro

selama periode yang sama. Kurang dari sepertiga kerugian non-manusia ditanggung oleh asuransi. Menutup kesenjangan perlindungan iklim dengan meningkatkan cakupan asuransi dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pulih dari bencana, mengurangi kerentanan, dan mendukung ketahanan (European Environment Agency, 2023). Komisi Eropa memperkirakan bahwa Eropa akan membutuhkan sekitar € 520 miliar investasi swasta dan publik tambahan per tahun hingga tahun 2030 untuk transisi hijau. Secara global, Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa investasi dalam energi bersih sekitar USD 4 triliun per tahun akan dibutuhkan pada tahun 2030 untuk membawa dunia ke jalur yang tepat untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050, dan sekitar 70% dari investasi tersebut perlu dilakukan oleh sektor swasta (McCaul, 2022).

Perubahan Iklim telah membuat resiko bagi manusia dan aktivitasnya. Negara merupakan institusi yang harus berperan dalam mengatasi *climate change* karena pengaruhnya dan kemampuannya dalam membuat kebijakan. Selain itu, perusahaan yang mencari keuntungan perlu disadarkan dan dinegosiasi sehingga aktivitasnya tidak berkontribusi untuk merusak bumi. Perkembangan Norma penurunan emisi gas yang telah disetujui melalui perjanjian paris telah mendorong Norwegia untuk merubah kebijakannya termasuk dalam SWF mereka. Norwegia dengan strategi investasinya di perusahaan portofolionya yang pada penelitian ini yaitu Eropa Barat. SWF berupaya untuk mempengaruhi dan mengawasi perusahaan dalam aktivitas di muka bumi ini. Eropa barat merupakan wilayah yang memiliki dampak signifikan terhadap *climate change* serta resiko fisik dan transisi. Maka dari itu, judul penelitian dari saya yaitu **“PENGARUH KEBIJAKAN**

## **PROGRAM *SOVEREIGN WEALTH FUND* NORWEGIA TERHADAP *CLIMATE RISK* DI EROPA BARAT”**

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Peneliti menggunakan batasan waktu mulai 2013 sampai 2023. Alasan peneliti memulai penelitian dari tahun 2013 karena pada saat itu terjadi kampanye divestasi di perusahaan bahan bakar fosil dengan nama kampanye “*Divest Norway*”. Selain itu, penelitian dibatasi hingga sekarang karena usaha kebijakan masih terjadi. Selain itu batasan waktu yang diambil karena terjadi kebijakan signifikan seperti investasi di infrastruktur hijau di usaha menghadapi *climate risk*.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan SWF bertujuan untuk kepentingan negaranya dan rakyatnya. Asumsi bahwa Investor hanya seorang individu atau sebuah perusahaan keuangan, ternyata negara juga terlibat terhadap iklim investasi dan membentuk norma dan nilai tentang investasi untuk menghadapi perubahan iklim. Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka peneliti merumuskan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan SWF Norwegia terhadap penanganan *climate risk* di Eropa Barat?
2. Bagaimana tantangan penerapan Swf Norwegia untuk penanganan *climate risk* di Eropa Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh kebijakan SWF Norwegia dalam mengatasi *climate risk* di Eropa Barat

2. Untuk mengetahui tantangan penerapan kebijakan SWF Norwegia terhadap *climate risk* di Eropa Barat

Kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut, yakni:

1. Memberikan sumbangsi Ilmu Hubungan Internasional bagi Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami pemikiran Konstruktivisme
2. Menjadi referensi kajian bagi aktor Hubungan Internasional yaitu MNC, Organisasi, Individu, Pemerintah, dan organisasi non pemerintah yang terkait Investasi SWF di perusahaan multinasional serta investasi di bidang lingkungan

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu *Sovereign Wealth Fund*, Norma Internasional (*norms life cycle*) dan Investasi Hijau (*green Investment*). SWF akan menjelaskan GPFG sebagai dana kelola pemerintah yang diinvestasikan ke luar negeri dan manajemennya untuk menjalankan GPFG. Norma Internasional dengan menggunakan teori *norms life cycle* akan menjelaskan bagaimana norma internasional penurunan emisi gas yaitu Perjanjian Paris berkembang kemudian disebarkan ke berbagai aktor internasional termasuk pemerintahan Norwegia sehingga mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri Norwegia terutama terhadap kebijakan GPFG menghadapi *climate risk* di Eropa Barat. Kemudian, konsep *Green Investment* akan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Norwegia mempengaruhi upaya menghadapi *climate risk* dengan mempengaruhi perusahaan *multinational corporation* di bidang bahan bakar fosil dan investasi di infrastruktur hijau terutama di Eropa Barat.

a. *Sovereign Wealth Fund*

SWF didefinisikan oleh IWG sebagai dana investasi dengan tujuan khusus atau pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah umum. Dibentuk oleh pemerintah umum untuk tujuan ekonomi makro, SWF memegang, mengelola, atau mengadministrasikan aset untuk mencapai tujuan keuangan, dan menggunakan serangkaian strategi investasi yang mencakup investasi pada aset keuangan asing (Al-Hassan, Papoioannaou, Skancke, & Sung, 2013).

*International Working Group of Sovereign Wealth Funds* (IWG) (2008) mengategorikan SWF menjadi tiga jenis. Tipe pertama adalah SWF yang beroperasi sebagai badan hukum tersendiri, dengan kemampuan melakukan kegiatan dan diatur oleh undang-undang tertentu. Contoh jenis ini antara lain Kuwait, Korea Selatan, Qatar, dan *Abu Dhabi Investment Authority* (ADIA) di Uni Emirat Arab. Jenis kedua adalah SWF yang berbentuk perusahaan atau badan usaha milik negara, seperti Temasek dan *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC) dari Singapura, atau *China Investment Corporation* (CIC) dari China. SWF ini tunduk pada undang-undang perusahaan dan undang-undang SWF yang berlaku. Jenis ketiga adalah SWF yang terdiri dari kumpulan aset tanpa badan hukum tersendiri. Aset tersebut dapat dimiliki langsung oleh pemerintah atau bank sentral. Contoh jenis ini adalah Botswana, Kanada (khususnya Alberta), Chile, dan Norwegia (Dana Moneter Internasional, 2008).

SWF memiliki ukuran yang berbeda-beda, yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang berbeda-beda, dan berlokasi di berbagai belahan dunia. 20 SWF terbesar menguasai 90% dari total aset yang dimiliki SWF. Investor yang dimiliki pemerintah ini memperoleh kekayaan dari sumber daya alam (57%) dan sumber

non-komoditas lainnya seperti cadangan devisa dan aturan fiskal jangka panjang (43%). Negara-negara berkembang membentuk sebagian besar industri SWF, memegang 80% dari total aset industri, enam negara kurang berkembang (LDC) memiliki SWF. Pemimpin yang jelas dalam hal kekayaan berdaulat berdasarkan jumlah dan ukuran dana adalah Cina, Uni Emirat Arab (UEA), dan Norwegia (United Nations Environment Programme Resources and Markets Branch, 2017).

Pemilik SWF umumnya adalah Kementerian Keuangan yang biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan investasi, setelah meminta saran dari komite (atau dewan) investasi. Selain itu, konsultasi dengan para pemangku kepentingan dana tersebut misalnya, parlemen, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat) mengurangi risiko keputusan sepihak oleh satu pihak. Secara garis besar, ada dua faktor penentu utama dalam menentukan mandat investasi yang tepat: tujuan SWF dan kapasitas menanggung risiko SWF. Kedua faktor penentu tersebut akan berdampak pada dunia investasi dan proporsi SWF yang terekspos pada aset berisiko (Al-Hassan, Papoioannaou, Skancke, & Sung, 2013).

**b. *Norms Life Cycle***

Pendekatan norma merupakan bagian dari perspektif konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan empiris untuk mempelajari hubungan internasional. Empiris yang berfokus pada ide-ide intersubjektif yang mendefinisikan hubungan internasional. Konstruktivisme merupakan sebuah gerakan dalam teori HI yang mengkaji bagaimana perubahan norma dan identitas aktor internasional sehingga mempengaruhi dalam membentuk isi dari kepentingan negara (Pevehouse & Goldstein, 2017).

Konstruktivis berpendapat bahwa memahami proses struktur non-material mengkondisikan identitas aktor adalah penting karena identitas menginformasikan kepentingan dan kemudian tindakan. Selain itu konstruktivis berpendapat bahwa agen dan struktur saling dibentuk. Struktur normatif dan ideasional mengkondisikan identitas dan kepentingan para aktor, tetapi struktur itu tidak akan ada jika bukan karena praktik pengetahuan para aktor (Reus-Smit & True, 2005). Konstruktivisme sosial berfokus kepada kesadaran manusia dan perannya di dunia internasional. (Jackson & Georgensen, 2013). Konstruktivis lebih berfokus pada aspek sosial yang berbeda dengan teori HI lain yang berfokus pada materil. Dunia sosial dan politik, termasuk dunia hubungan internasional, bukanlah entitas fisik atau objek material yang berada di luar kesadaran manusia. Jadi, studi Hubungan Internasional menurut Konstruktivisme dikaji dengan berfokus pada ide-ide dan keyakinan yang menginformasikan aktor pada kancah internasional serta pemahaman bersama di antara aktor internasional (Diez et al., 2011).

Norma didefinisikan secara umum yaitu standar perilaku yang sesuai dengan aktor dengan identitas tertentu. Dalam hubungan internasional norma penting untuk menjelaskan perilaku dan kebijakan suatu negara. Menurut Finnemore, norma domestik sangat terkait dengan cara kerja norma-norma internasional. Banyak norma internasional dimulai sebagai norma domestik dan menjadi internasional melalui upaya pengusaha (*Entrepreneur*). Menurutnya semua pengaruh domestik paling kuat pada tahap awal *norm life cycle*, dan pengaruh domestik berkurang secara signifikan setelah norma dilembagakan dalam sistem internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Kepentingan negara didefinisikan dalam konteks norma-norma yang dianut secara internasional dan pemahaman tentang apa yang baik dan pantas. normatif itu konteks mempengaruhi perilaku pembuat keputusan dan publik massa yang dapat memilih dan membatasi para pembuat keputusan tersebut. Yang normatif konteks juga berubah dari waktu ke waktu, dan sebagai norma yang dianut secara internasional dan perubahan nilai, mereka menciptakan pergeseran terkoordinasi dalam kepentingan dan perilaku negara antar sistem (Finnemore, 1996).

Norma dalam masyarakat internasional menurut Finnemore adalah entitas yang terkonstruksi sosial oleh aktor-aktor politik. Norma tersebut tidak muncul secara alami tetapi diciptakan dan diterima oleh para aktor dalam interaksi sosial mereka. Sehingga norma juga dapat menjadi panduan perilaku yang menjadi kerangka pandangan bagi aktor dalam mengambil tindakan dan keputusan. Maka dari itu, Norma bisa menjadi sumber kekuasaan dan legitimasi yang memperkuat struktur kekuasaan dalam sistem internasional. Sedangkan legitimasi dapat dimiliki oleh aktor karena diterima secara luas sehingga memberikan kepercayaan terhadap aktor serta dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dinamika perubahan norma dapat dijelaskan dengan konsep *norms cycle*. Konsep ini menjelaskan proses penerimaan norma baru dan internalisasi norma di aktor politik internasional. Terdapat tiga tahap utama dalam *norms cycle* yaitu Pemunculan Norma baru (*Norm emergence*), *Norm cascade* (Penyebaran Norma), Internalisasi norma (*Norm Internalization*). Konsep ini berfokus untuk melihat proses dinamis dari perkembangan norma-norma baru dan cara norma mempengaruhi tindakan politik dalam masyarakat internasional. Norma-norma mengatur perilaku, merubah pemahaman, identitas, dan realitas politik (Finnemore

& Sikkink, 1998). Maka dari itu, Finnemore berpendapat bahwa identitas dan kepentingan ditentukan oleh kekuatan internasional, yaitu, dengan norma-norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Proses perkembangan norma oleh masyarakat internasional membentuk kekuatan untuk mempengaruhi perilaku aktor internasional. Ditahap *norm emergence* terjadi pembentukan Norma oleh dua elemen penting yaitu *norm entrepreneur* dan platform organisasi tempat *Entrepreneurs* beraksi. Norma tidak muncul begitu saja mereka secara aktif dibangun oleh agen yang memiliki gagasan kuat tentang perilaku yang sesuai atau diinginkan dalam komunitas mereka. Mereka memegang peran penting dalam memberikan perhatian terkait dengan isu-isu atau bahkan menciptakan isu dengan cara *framing*. Dalam membangun *framing* mereka, *entrepreneurs* menghadapi norma lama dan membingkai alternatif yang tertanam kuat yang menciptakan persepsi alternatif tentang kepantasan dan kepentingan. Motivasi mereka bervariasi maka dari itu perlu Altruisme, Empati, ideasional, komitmen untuk menjelaskan motivasi mereka.

Fase kedua yaitu *norm cascade* yang merupakan sedikit perubahan normatif terjadi tanpa gerakan domestik yang signifikan yang mendukung perubahan tersebut. Setelah tipping titik telah tercapai, namun, dinamika yang berbeda dimulai. Lebih banyak negara dimulai untuk mengadopsi norma-norma baru lebih cepat bahkan tanpa tekanan domestik untuk perubahan tersebut. Studi empiris menunjukkan bahwa, pada titik ini, sering terjadi efek demonstrasi internasional atau regional atau "penularan" dimana norma internasional dan transnasional pengaruh menjadi lebih penting daripada politik dalam negeri untuk mempengaruhi

perubahan norma. Mekanisme dominan yang digunakan dalam tahap ini adalah sosialisasi, institusionalisasi, dan demonstrasi. Sosialisasi merupakan mekanisme dominan dari tahap kaskade norma mekanisme melalui para pemimpin norma membujuk orang lain untuk mematuhi norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998).

Di tahap internalisasi (*norm internalization*) yang merupakan tingkat ekstrim *norm cascade*, norma bisa menjadi begitu diterima secara luas sehingga mereka diinternalisasi oleh aktor dan mencapai kualitas diterima yang membuat kesesuaian dengan norma mereka hampir secara otomatis. Adapun aktor yang berperan adalah agen Profesi sering berfungsi sebagai agen yang kuat dan menyebar yang bekerja untuk menginternalisasi norma di antara para anggotanya. Mekanisme lain yang kuat dan terkait berkontribusi pada konsolidasi dan universalisasi norma setelah kaskade norma dapat berupa iterasi perilaku dan kebiasaan yang menciptakan internalisasi norma. Berdasarkan penelitian teoritis asal usul norma sangat menekankan agensi manusia, ketidakpastian, kejadian kebetulan, dan peristiwa yang menguntungkan, menggunakan penelusuran proses dan silsilah sebagai metode (Finnemore & Sikkink, 1998).

Identitas dan kepentingan ditentukan oleh kekuatan internasional, yaitu oleh norma-norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional. Norma-norma masyarakat internasional ditransmisikan ke negara-negara melalui organisasi internasional. Martha Finnemore dengan demikian berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dipromosikan oleh organisasi internasional dapat secara meyakinkan mempengaruhi pedoman nasional dengan mendorong negara untuk mengadopsi norma-norma ini (Georgensen and Jackson, Hal 219).

Fakta bahwa manusia hidup dalam masyarakat internasional berarti apa yang manusia inginkan dan, dalam beberapa hal, siapa mereka dibentuk oleh norma sosial, aturan, pemahaman, dan hubungan yang kita miliki dengan yang lain. Realitas sosial ini sama berpengaruhnya dengan realitas material dalam menentukan perilaku. Memang, merekalah yang menganugerahi realitas material dengan makna dan tujuan. Dalam istilah politik, realitas sosial inilah yang memberi tujuan, yaitu kekuasaan dan kekayaan dapat digunakan (Georgensen and Jackson, Hal 219).

Pada penelitian ini, Teori *norms life cycle* akan menjelaskan bagaimana norma melalui aktor internasional mempengaruhi perilaku aktor lain. Selain itu, teori ini akan menjelaskan motivasi aktor yaitu kepentingan, identitas, dan pemahaman terhadap permasalahan dengan pengaruh norma yang telah disepakati. Maka dari itu, teori ini lebih menekankan pada perubahan yang disebabkan oleh adaptasi norma yang dilakukan oleh aktor internasional.

**c. *Green Investment (GI)***

*Green Investment (GI)* atau Investasi Hijau merupakan istilah yang sangat luas. GI dapat dipahami sebagai independen konsep, dan bagian investasi yang lebih luas. Menurut OECD GI mengacu secara luas pada investasi rendah karbon dan perubahan iklim investasi yang dilakukan di perusahaan, proyek dan instrumen keuangan yang beroperasi terutama di energi terbarukan, teknologi bersih, teknologi lingkungan atau pasar terkait keberlanjutan serta investasi yang khusus untuk perubahan iklim (Inderst, Kaminker, & Stewart, 2012).

Menurut Rachman (2018) GI adalah suatu aktivitas penanaman modal pada perusahaan yang berinvestasi dengan memiliki komitmen pada fokus sumber daya

alam (SDA), produksi, serta penciptaan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBIT), pengimplementasian proyek air dan udara bersih, serta kegiatan investasi lain yang ramah lingkungan. IMF menilai bahwa GI merupakan investasi yang dibutuhkan guna meminimalkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara tanpa mengurangi proses bisnis perusahaan non-energi baik investasi publik maupun swasta (Eyraud & Wane, 2011).

Konsep GI menjadi semakin digunakan dengan berkembangnya kepedulian terhadap Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan pertumbuhan hijau (*Green Growth*). GI mendapat perhatian internasional yang signifikan di tahun 2010–2011 serta menjadi alat untuk pendekatan masalah krisis keuangan di tahun 2008. Selain itu, Pembahasan GI yang termasuk dalam ekonomi hijau menjadi salah satu dari dua tema Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di 2012 (Rio+20) (Chitimia, Minciu, Mariana Manta, Ciociu, & Veith, 2021). Permasalahan lingkungan yang muncul seperti pemanasan global memerlukan peralihan ke ekonomi rendah karbon, tahan iklim, dan hemat sumber daya, dan “*Greening Growth*” yang lebih luas kedepannya hingga 2030 yang akan membutuhkan investasi dan akibatnya sumber modal swasta dalam skala yang jauh lebih besar. Maka dari itu, diperlukan aliran dana yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Investor Institusi seperti SWF dapat memberikan peran yang besar terhadap tujuan tersebut (Chitimia, Minciu, Mariana Manta, Ciociu, & Veith, 2021).

GI mulai diperhatikan karena adanya keraguan konsumen. Konsumen memberikan perhatian terhadap produk hijau<sup>1</sup> yang membuat perusahaan dan

---

<sup>1</sup> Istilah “produk ramah lingkungan” umumnya digunakan untuk menggambarkan produk yang berupaya melindungi atau meningkatkan kualitas lingkungan selama produksi, penggunaan, atau pembuangan dengan melestarikan sumber daya dan meminimalkan penggunaan bahan beracun, polusi, dan limbah.

organisasi mulai berfokus terhadap proyek hijau. Maka dari itu kegunaan dari teknologi hijau dan GI menjadi hal yang sangat esensial untuk perusahaan agar mendapatkan tempat lebih dalam persaingan di pasar. Hal itu terjadi karena dampak yang diakibatkan oleh pembelian barang tersebut (Chitemiea A, 2021). Hasilnya menunjukkan bahwa GI akan meningkatkan faktor profitabilitas organisasi dan kemampuan untuk mengubahnya proses kerja dengan strategi baru. Hasilnya penerbitan GI secara langsung mempengaruhi CSR dengan mengangkat isu-isu terkait lingkungan ke garis depan untuk perusahaan. tidak perlu dipertimbangkan. Demikian pula, CSR mendorong pengabdian pembuat kebijakan untuk mengembangkan layak rencana kebijakan untuk menghindari ancaman pemanasan global (Zhang Ye, 2022).

Beberapa keuntungan penerapan GI yaitu mendapat dana bantuan karena fasilitas pemerintah, memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mengkonsumsi produk hijau dan untuk melindungi lingkungan, umumnya pembebasan pajak tertentu untuk penggunaan teknologi hijau, dan peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, kepuasan dari Investor, yang senang menginvestasikan sumber daya keuangan mereka secara bertanggung jawab, Memberikan sejumlah manfaat untuk generasi mendatang juga (Chitemiea , A, 2021).

GI sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik sehingga terdapat faktor yang mempengaruhi GI yaitu: politik, ekonomi, dan lingkungan.

1. Faktor politik memiliki dampak besar pada GI dengan menciptakan fasilitas dan implementasi aturan/hukum untuk melindungi lingkungan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah: pemberian subsidi bagi perusahaan untuk GI, diskon diberikan kepada konsumen yang membeli organik

produk, pajak lingkungan, dan denda bagi perusahaan yang tidak mematuhi polusi peraturan.

2. Faktor-faktor ekonomi menjadi pendorong kuat GI dengan mengungkapkan praktik perusahaan untuk menyuarakan tentang lingkungan. Faktor ekonomi merujuk ke hubungan antara emisi karbon, konsumsi energi, dan pembangunan keuangan berkelanjutan.
3. Kemudian faktor lingkungan mendorong GI karena dapat membantu menghindari krisis lingkungan dan meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga perlu penciptaan teknologi hijau sama dengan industri hijau (Inderst, Kaminker, & Stewart, 2012).

GI memiliki beberapa bentuk investasi yaitu dalam energi terbarukan, efisiensi energi, Infrastruktur berkelanjutan, *Cleantech*, Obligasi Hijau, dan *Responsibility Social Investment* (RSI) serta Investasi ESG. Seluruh bentuk investasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan untuk menghadapi permasalahan lingkungan. Menurut OECD GI juga disebut sebagai investasi ramah lingkungan, lingkungan, investasi sosial dan tata kelola (ESG), investasi bertanggung jawab secara sosial atau berkelanjutan (SRI), atau investasi bertanggung jawab (RI). Sehingga konsep ini mendefinisikan aktivitas investasi perusahaan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, mengurangi polusi, mengurangi emisi karbon, penggunaan sumber energi alternatif, dan melestarikan sumber daya alam (Inderst, G., Kaminker, C., Stewart, F., 2012).

GI memiliki dua kelas aset terpenting yaitu ekuitas swasta dan infrastruktur. Ekuitas swasta dan infrastruktur hijau telah mengalami pertumbuhan yang kuat, khususnya untuk energi terbarukan dan perusahaan teknologi bersih dalam

beberapa tahun terakhir. Institusional Investor menerapkan prinsip investasi ESG. Prinsip ini mendorong investor untuk berinvestasi di GI. ESG (*Environmental, Social, and Government*) membuat investor mengalirkan dananya untuk berinvestasi di GI. ESG terintegrasi dengan strategi investasi investor sehingga dapat mengalirkan dana ke sektor hijau dan mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan aktivitas yang lebih (Inderst, Kaminker, & Stewart, 2012).



Gambar 1 Kerangka Konsep

Sumber: Penulis

## E. Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman suatu fenomena terhadap tindakan dan perilaku yang akan diuraikan secara deskriptif. Penulis akan menguraikan kebijakan investasi SWF Norwegia untuk mengatasi *climate risk*

### b. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (riset perpustakaan) dan studi literatur agar dapat memperoleh data. Data yang digunakan

berasal dari berbagai sumber, meliputi jurnal, buku, artikel, laporan, dan website pemerintah.

### **c. Teknik dan Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik Studi Literatur. Teknik ini akan menganalisis berdasarkan hasil kajian dan studi mengenai GPFG. Teknik ini akan menganalisis data dari langkah-langkah internalisasi norma oleh pemerintah Norwegia untuk dijadikan kebijakan investasi untuk menghadapi *climate risk*. Selain itu, teknik ini akan digunakan untuk melihat proses dan pembentukan kebijakan investasi ke perusahaan multinasional di bidang bahan bakar fosil dengan menggunakan *norms internalization* yang berfokus terhadap Norma Internasional terkait upaya menghadapi *climate risk*.

### **d. Metode Penulisan**

Peneliti akan menggunakan metode penulisan deduktif. Metode menjelaskan secara khusus setiap proses yang ditempuh suatu norma sehingga dapat diimplementasikan di suatu negara dan bagaimana kebijakan investasi ini mempengaruhi perusahaan bahan bakar fosil untuk melaksanakan aktivitas perusahaan yang tujuannya untuk menghadapi *climate risk*.

## **BAB II**

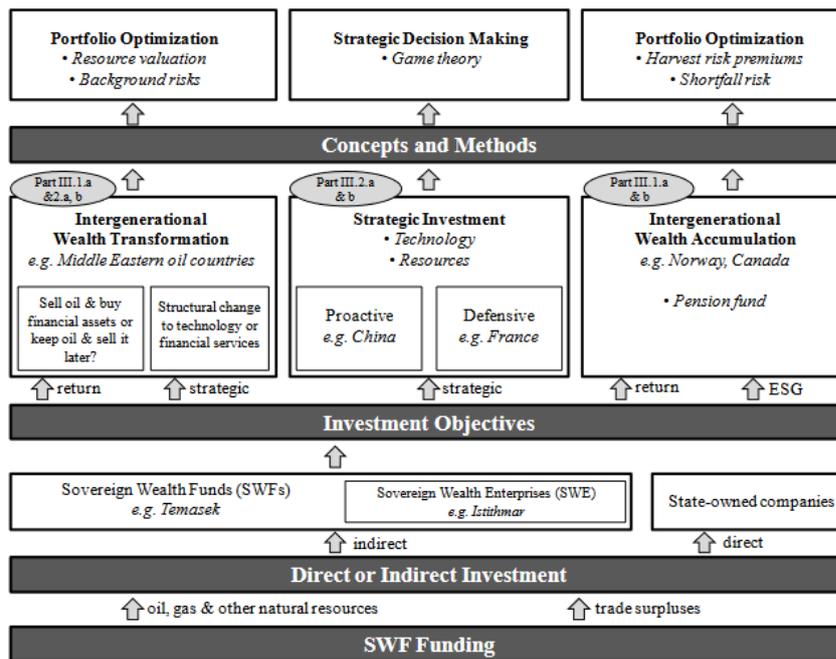
### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Sovereign Wealth Fund (SWF)***

Dana kekayaan negara, atau yang juga dikenal dengan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) adalah dana investasi milik negara yang dikelola untuk tujuan jangka panjang, seperti untuk menstabilkan perekonomian, menyediakan dana pensiun bagi warga negara, atau berinvestasi dalam infrastruktur nasional. SWF memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Perannya membantu menstabilkan perekonomian, menyediakan dana pensiun bagi warga negara, dan berinvestasi dalam infrastruktur nasional. Menurut data Jumlah SWF di dunia terus meningkat pesat, terutama sejak akhir tahun 1990-an. Saat ini, ada 78 SWF di 50 negara (SWFI Institute, 2019).

Istilah SWF pertama kali digunakan pada tahun 2005 oleh Andrew Rozanov, seorang pejabat negara *Street Bank of America*. Rozanov menyatakan bahwa SWF terbentuk karena adanya surplus anggaran dan surplus perdagangan luar negeri di suatu negara serta adanya pendapatan komoditas. Surplus ini kemudian dikelola oleh lembaga-lembaga investasi yang didirikan oleh pemerintah (Ping & Chao, 2009). Keberadaan SWF telah ada sejak lama, bahkan sebelum abad ke-21. Dana kekayaan negara modern pertama yang sesuai dengan definisi SWF adalah dana yang didirikan di Kuwait pada tahun 1953 untuk mengelola surplus pendapatan dari minyak (Alhashel, 2015).

Tiga karakteristik utama SWF, yaitu dikendalikan oleh negara, berinvestasi di luar negeri, didirikan untuk tujuan jangka panjang. SWF berbeda dari cadangan devisa Bank Sentral yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan neraca



Gambar 2 Klasifikasi SWF berdasarkan Objektif dan Metode

pembayaran. SWF juga berbeda dari lembaga-lembaga investasi lain, seperti perusahaan swasta dan dana investasi, yang tidak dikendalikan oleh negara (IWG, 2008: 27). Jenis-jenis SWF ada tiga yaitu: Stabilisasi, Tabungan, dan Pengembangan (Gilson dan Milhaupt 2008). Pengklasifikasian SWF dapat dijelaskan dengan pendekatan yang berbasis tujuan investasi dan strategi. Mengklasifikasikan SWF dimulai dari dua sumber pendanaan yaitu dari surplus perdagangan dan komoditas. Kemudian pengelompokan selanjutnya yaitu investasi langsung dan tidak langsung yang mana langsung yaitu SWF dan SWE<sup>2</sup> (*Sovereign Wealth Enterprises*) sedangkan yang langsung itu masuk ke BUMN (Wagner, 2014).

Pada investasi langsung yaitu SWF terbagi berdasarkan tujuannya. Pengelompokannya yaitu *Intergovernmental Wealth Transformation* yang contohnya yaitu SWF dari negara-negara minyak yang menjual minyak dan

membeli aset dan atau strukturisasi ke teknologi atau jasa finansial, kemudian *Strategic Investment* terbagi menjadi dua *proactive* seperti SWF China dan *defensive* seperti Perancis yang fokus investasinya itu teknologi dan sumber daya dengan metode dan konsep yang mereka gunakan yaitu *strategic decision making* yang menggunakan konsep *game theory*, dan yang terakhir *Intergenerational wealth accumulation* pendapatannya tidak langsung dengan objektifnya ke pendapatan dan ESG contoh dari SWF ini yaitu Pension Fund seperti SWF Norwegia dan Kanada dengan menggunakan konsep *Harvest risk premiums*<sup>3</sup> dan *Shortfall risk*<sup>4</sup> dengan metode optimalisasi portofolio (Wagner, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, Strategi yang digunakan GPFG untuk negara-negara yang mengumpulkan kekayaan melalui SWF adalah strategi portofolio dengan aset keuangan. Teori portofolio tradisional akan menyarankan diversifikasi internasional daripada diversifikasi domestik yang terkonsentrasi portofolio untuk meningkatkan karakteristik risiko pengembalian portofolio karakteristik portofolio. SWF juga cenderung untuk memiliki proporsi yang lebih tinggi dari aset domestik atau wilayah asal aset domestik atau wilayah asal daripada yang direkomendasikan oleh teori portofolio. Alasannya mungkin berkaitan dengan ikatan budaya atau pertimbangan strategis (Wagner, 2014).

Tujuan *sovereign wealth funds* adalah untuk mengamankan dan menstabilkan anggaran serta ekonomi dari fluktuasi yang berlebihan akibat penguatan mata uang domestik. Mereka juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada

---

<sup>3</sup> *Harvest risk premiums* mengacu pada strategi investasi yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan dalam tingkat pengembalian antara aset yang memiliki risiko yang berbeda. Istilah "harvest" dalam konteks ini merujuk pada memanen atau mendapatkan keuntungan dari perbedaan atau premi risiko yang ada di pasar keuangan.

<sup>4</sup> *Shortfall risk* adalah risiko bahwa portofolio investasi tidak akan mencapai tujuan atau target keuangan yang telah ditetapkan.

sektor ekspor komoditas tidak terbarukan, dengan mengalihkan investasi ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur dan jasa. Selain itu, mereka berusaha untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi daripada cadangan devisa, membantu mengontrol likuiditas yang tidak diinginkan, dan meningkatkan tabungan untuk masa depan dengan mengubah kekayaan tidak terbarukan menjadi aset keuangan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga mendukung pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik, serta berfungsi sebagai instrumen politik ekonomi melalui investasi dalam obligasi pemerintah, institusi, dan perusahaan penting dalam perekonomian negara target (Febriyanta, 2021).

Perbedaan SWF dan cadangan devisa yang disimpan oleh bank sentral adalah tujuan. SWF memprioritaskan keuntungan jangka panjang dibandingkan likuiditas, bank sentral fokus menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban dan mendukung kebijakan moneter. SWF biasanya memiliki kebijakan investasi selama tiga hingga lima tahun, sehingga lebih toleran terhadap risiko dibandingkan dengan cadangan devisa. Berbeda dengan SWF, bank sentral menyimpan cadangan devisa dalam mata uang asing khusus untuk tujuan menjamin likuiditas dan kemampuan menarik dana bila diperlukan. (Febriyanta, 2021).

Perkembangan SWF sekarang adalah berinvestasi dalam portofolio global yang terdiversifikasi. Selain itu, SWF meningkatkan eksposur ke kelas aset alternatif serta infrastruktur dan *real estat* adalah kelas aset yang disukai oleh SWF untuk transaksi langsung. SWF besar seperti GPFG adalah investor canggih yang memimpin transaksi modal ventura dan transaksi infrastruktur yang kompleks secara global. Kemudian kecenderungan SWF lebih memilih pasar negara maju daripada negara berkembang. Tujuan utama SWF yaitu Profesionalisasi yang harus

memfasilitasi peningkatan eksposur terhadap investasi jangka panjang, termasuk aset berkelanjutan (United Nations Environment Programme Resources and Markets Branch, 2017).

## **B. *Norms Life Cycle***

Konstruktivis merupakan perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional yang memberikan perhatian ke kesadaran manusia di permasalahan International. Fokus dari perspektif ini adalah hal sosial yang tidak materialis. Selain itu, perspektif ini berpendapat bahwa realitas sosial tidak objektif, atau sesuatu yang berada di luar, untuk observasi hubungan internasional. Menurut perspektif ini sistem ada hanya sebagai kesadaran intersubjektif, atau pemahaman umum, diantara orang-orang yang berarti sistem dibentuk oleh gagasan, bukan oleh kekuatan material. Selain itu, Konstruktivisme menganggap realitas sosial adalah sebuah penemuan atau kreasi manusia yang berarti bukan dari jenis fisik atau material tetapi murni dari intelektual dan tipe ideasional. Jadi, realitas sosial adalah seperangkat ide, tubuh pemikiran, sistem norma, yang telah ada diatur oleh orang-orang tertentu pada waktu dan tempat tertentu (Jackson & Soergensen, 2013).

Menurut Wendt Neorealisme bersifat materialis menganggap kekuasaan dan kepentingan dipandang sebagai faktor materi; mereka adalah entitas objektif dalam pengertian bahwa karena anarki negara-negara terpaksa disibukkan dengan kekuasaan dan kepentingan. Dalam pandangan ini, ide tidak begitu penting; mereka dapat digunakan untuk rasionalisasi tindakan yang ditentukan oleh kepentingan material. Pandangan ideasional yang dianut oleh konstruktivis sosial, gagasan selalu penting (Wendt, 1992).

Menurut Tannenwald premis awal adalah bahwa dunia material tidak dapat ditentukan dan ditafsirkan dalam hal yang lebih besar dalam konteks makna. Dengan demikian, gagasan mendefinisikan makna kekuatan material. Penting dipahami bahwa elemen ideasional inti yang menjadi fokus kaum konstruktivis adalah keyakinan intersubjektif (dan gagasan, konsepsi, dan asumsi) yang dimiliki bersama secara luas di antara orang-orang. Ide harus dibagikan secara luas ke materi namun mereka dapat diselenggarakan oleh kelompok yang berbeda, seperti organisasi, pembuat kebijakan, kelompok sosial, atau masyarakat. Sedangkan gagasan adalah konstruksi mental yang dipegang oleh individu, seperangkat keyakinan, prinsip, dan sikap khusus yang memberikan orientasi luas untuk perilaku dan kebijakan (Tannenwald, 2005).

Penyebaran norma dapat berawal dari norma domestik. Menurut Finnemore Norma domestik terkait dengan cara kerja norma-norma internasional. Beberapa norma internasional dimulai sebagai norma domestik dan menjadi internasional melalui upaya *entrepreneur* dengan berbagai macam cara dan mekanisme. Norma-norma internasional memberikan pengaruhnya melalui penyaringan struktur domestik dan norma domestik, yang dapat menghasilkan variasi penting dalam ketaatan dan interpretasi norma-norma di suatu aktor (Finnemore and Sikkink, 1998). *Domestic entrepreneur norms* merupakan aktor yang mewakili minoritas dalam pemanfaatan posisinya untuk norma internasional agar menguatkan posisi di debat domestik. Menurut Martha Finnemore, norma domestik dan norma internasional adalah dua tingkatan norma yang berbeda yang mempengaruhi perilaku aktor-aktor dalam sistem internasional, seperti negara-negara.

Norma domestik adalah norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu negara atau dalam struktur domestik suatu negara. Ini mencakup hukum nasional, nilai-nilai, kebijakan, dan norma sosial yang mengatur perilaku di dalam batas-batas suatu negara. Norma internasional, di sisi lain, merujuk pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di tingkat internasional, termasuk perjanjian internasional, konvensi, hukum internasional, dan norma-norma yang diakui secara global (Finnemore and Sikkink, 1998). Ada tiga cara utama di mana hubungan ini dapat berinteraksi. Pertama yaitu dengan harmonisasi yang pada umumnya norma domestik suatu negara dapat sejalan dengan norma internasional. Negara-negara dapat mengadopsi atau berkonformitas dengan norma internasional dalam hukum, kebijakan, dan praktik domestik mereka. Ini menciptakan harmoni antara norma domestik dan internasional.

Cara kedua yaitu pertentangan dalam situasi lain, norma domestik suatu negara mungkin bertentangan dengan norma internasional. Ini dapat menyebabkan ketegangan atau konflik antara kewajiban internasional dan tuntutan atau norma domestik. Dalam kasus seperti ini, negara harus menavigasi dan mengatasi konflik ini. Ketiga yaitu resistensi dan perubahan terkadang, norma domestik suatu negara dapat menghadapi resistensi terhadap norma internasional yang baru atau berbeda. Namun, dengan waktu, norma domestik dapat berubah atau beradaptasi dengan norma internasional baru, menciptakan perubahan dalam perilaku dan praktik domestik (Finnemore and Sikkink, 1998). Jadi, Finnemore berpendapat bahwa hubungan antara norma domestik dan internasional merupakan bagian penting dari dinamika dalam hubungan internasional dan bahwa perubahan dalam norma

domestik dan internasional dapat mempengaruhi tindakan negara-negara dalam masyarakat internasional.

*Norm life cycle*, yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dalam kerangka teori hubungan internasional, adalah konsep yang menjelaskan bagaimana norma-norma internasional berkembang, tersebar, diterima, dan mungkin mengalami perubahan dalam masyarakat internasional. Selain itu, Teori ini, menyoroti bagaimana norma-norma internasional berkembang dan mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional dalam masyarakat internasional. Konsep ini membantu menjelaskan perubahan dalam norma-norma dan nilai-nilai yang memengaruhi dinamika hubungan internasional. Teori terdiri dari tiga tahap sebagai berikut:

Dalam *norms life cycle*, prosesnya dimulai pada tahap *emergence* dan berkembangnya norma-norma baru. Pengenalan ide atau perilaku baru oleh *norm entrepreneur* dan upaya membuat orang lain menerimanya adalah hal yang dilakukan pada tahap ini. Persuasi, argumentasi, dan demonstrasi digunakan dalam proses ini. Ketika suatu norma telah diadopsi oleh beberapa orang, norma tersebut mulai di tahap *cascade* melalui peniruan; *norm entrepreneurs* adalah yang pada awalnya menerima norma tersebut karena merekalah yang memulai efek berjenjang ini yang kemudian mengakibatkan aktor lain mengamati dan mengikutinya. Dalam kebanyakan kasus, tahap ini digambarkan sebagai efek bola salju, yaitu suatu tindakan yang mulai diterima oleh semakin banyak orang, sehingga berkontribusi terhadap penerimaan oleh orang lain (Finnemore and Sikkink, 1998).

Tahap selanjutnya, *Internalization* (Internalisasi) pada tahap ini, norma menjadi tertanam dalam nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Orang tidak lagi hanya mengikuti norma karena tekanan sosial atau keinginan untuk dihargai, tetapi

karena mereka percaya bahwa perilaku yang sesuai norma itu benar dan penting. Norma menjadi internalisasi, dimana individu mematuhi secara otomatis tanpa perlu memikirkan konsekuensi eksternal.

	<i>Stage 1 Norm emergence</i>	<i>Stage 2 Norm cascade</i>	<i>Stage 3 Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Gambar 2 Stage Norms life Cycle

Sumber Penelitian: (Finnemore and Sikkink, 1998)

**a. Emergence of Norms (Perkembangan Norma)**

Pada tahap ini, sebuah norma baru muncul dalam masyarakat internasional. Hal ini dapat dipicu oleh peristiwa-peristiwa tertentu, tindakan aktor-aktor tertentu, atau masalah global yang muncul. Norma ini awalnya mungkin hanya diterima oleh sebagian kecil aktor internasional. Norma diperkenalkan oleh aktor-aktor tertentu, seperti negara, organisasi non-pemerintah, individu, atau kelompok kepentingan. Aktor-aktor ini bisa memainkan peran penting dalam memunculkan norma dengan melakukan advokasi, menggalang dukungan, atau mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan perubahan dalam norma-norma internasional (Finnemore and Sikkink, 1998).

Tantangan pada tahap "*emergence*," norma yaitu belum diterima secara luas dalam masyarakat internasional. Sebaliknya, munculnya norma seringkali memicu kontroversi dan perdebatan. Negara-negara atau aktor lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai norma tersebut, dan proses negosiasi dan diskusi mungkin diperlukan untuk memutuskan apakah norma tersebut harus diakui. Norma-norma baru sering kali muncul sebagai respons terhadap perubahan dalam lingkungan internasional. Perubahan politik, ekonomi, sosial, atau teknologi dapat menciptakan tantangan baru yang memerlukan norma-norma baru atau revisi norma-norma yang ada (Finnemore & Sikkink, 1998).

Definisi Operasionalnya *norm emergence* merupakan tahap ketika norma baru terbentuk dibantu oleh *norms entrepreneur* yang dibentuk dan dibantu oleh platform organisasi untuk mempengaruhi masa kritis dari negara yang bertujuan untuk menjadi norma pemimpin agar dapat menganut norma baru. Dua elemen penting dalam keberhasilan penciptaan sebagian besar norma baru yaitu pengusaha norma (*Norm Entrepreneur*) dan platform organisasi tempat *Entrepreneur* bertindak. Norma muncul karena adanya *Norm Entrepreneur* secara aktif yang dibangun oleh agen yang memiliki gagasan kuat tentang perilaku yang pantas atau diinginkan dalam komunitas mereka (Finnemore & Sikkink, 1998).

Aktor yang berperan dalam tahap ini adalah *norm entrepreneur* yang berperan dalam munculnya norma. Mereka meminta perhatian pada masalah atau bahkan menciptakan (*create*) masalah dengan menggunakan bahasa yang menamai, menafsirkan, dan mendramatisir suatu norma situasi ini dikenal sebagai "*Framing*". Strategi yang mereka gunakan yaitu konstruksi kerangka kognitif yang merupakan komponen penting dari strategi politik pengusaha norma, karena ketika

mereka berhasil, kerangka baru beresonansi dengan pemahaman publik yang lebih luas dan diadopsi sebagai cara baru untuk membicarakan dan memahami masalah. Pada proses ini *entrepreneur* dihadapkan dengan norma alternatif yang tertanam kuat dan tantangan pembentukan persepsi alternatif baru yang pantas dan sesuai dengan kepentingan dari aktor domestik (Finnemore & Sikkink, 1998).

Aktor yang membantu *emergence* yaitu platform organisasi merupakan promotor dari seluruh norma di level internasional untuk perintis norma ataupun yang menjadi penerus norma untuk dipromosikan. Norma biasanya dipromosikan secara spesifik dengan tujuan tertentu. NGO seperti *Red Cross*, dan *Transafrica*, *Greenpeace* yang mempromosikan norma hak asasi manusia, lingkungan, atau perlawanan Apartheid di Afrika. *Entrepreneur* memiliki tujuan dalam melaksanakan usahanya di organisasi internasional bukan hanya untuk mempromosikan norma saja tetapi dapat memiliki tujuan dan agenda lain. Agenda yang mereka lakukan bertujuan juga untuk mendukung dan mempromosikan norma yang ingin mereka bentuk. Seperti *World Bank*, *United Nation*, *International Labour* (Finnemore & Sikkink, 1998).

Di platform organisasi apapun mereka, para pengusaha norma dan organisasi yang mereka tempati biasanya perlu mendapatkan dukungan dari aktor-aktor negara untuk mendukung norma-norma mereka dan menjadikan sosialisasi norma sebagai bagian dari agenda mereka, dan platform organisasi yang berbeda menyediakan berbagai jenis alat bagi para pengusaha untuk melakukan hal tersebut. Organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia, meskipun tidak dirancang untuk mempromosikan norma, dapat memiliki keunggulan sumber daya dan pengaruh

terhadap negara-negara yang lemah dan berkembang yang ingin mereka ajak untuk beralih ke keyakinan normatif mereka (Finnemore & Sikkink, 1998).

Pencapaian *norm emergence* perlu adanya institusionalisasi spesifik dari peraturan internasional dan organisasi internasional. *Emergence norms* terinternalisasi di hukum internasional, dihukum multilateral organisasi dan kebijakan bilateral luar negeri. Institusionalisasi memberikan kesempatan untuk norma menyebar dengan mengklarifikasi apa, memastikan dan mendefinisikan norma, serta mengatur pelanggaran, apa yang dimaksud dengan norma dan apa yang merupakan pelanggaran (sering kali merupakan masalah ketidaksepakatan di antara para aktor) dan dengan menjabarkan secara prosedur yang digunakan para pemimpin norma untuk mengkoordinasikan ketidaksetujuan dan sanksi untuk pelanggaran norma (Finnemore & Sikkink, 1998).

Menurut Finnemore untuk mengetahui motivasi dari *Norms Entrepreneur* perlu dilihat dari empat pendekatan yaitu empati, altruism, ideational, komitmen. Empati muncul ketika para aktor memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam perasaan atau gagasan orang lain. Empati semacam itu dapat mengarah pada saling ketergantungan empati, di mana para pelaku 'tertarik pada kesejahteraan orang lain demi kepentingannya sendiri, meskipun hal ini tidak berpengaruh pada kesejahteraan atau keamanan material mereka sendiri (Finnemore & Sikkink, 1998).

Mekanisme yang digunakan untuk mengembangkan norma yaitu dengan meminta perhatian pada masalah atau bahkan 'menciptakan' masalah dengan menggunakan bahasa yang menamai, menafsirkan, dan mendramatisir suatu norma situasi ini dikenal sebagai "*Framing*". Strategi yang mereka gunakan yaitu

konstruksi kerangka kognitif yang merupakan komponen penting dari strategi politik pengusaha norma, karena ketika mereka berhasil, kerangka baru beresonansi dengan pemahaman publik yang lebih luas dan diadopsi sebagai cara baru untuk membicarakan dan memahami masalah (Finnemore & Sikkink, 1998).

**b. Titik Kritis Atau Ambang Batas.**

Setelah para *norms entrepreneur* membujuk para aktor kritis (Aktor yang menjadi pemimpin dan krusial) untuk menjadi pemimpin norma dan mengadopsi norma baru, maka norma mencapai ambang batas atau titik kritis. Pertama, Studi empiris menunjukkan bahwa *tipping norma* jarang terjadi sebelum sepertiga dari total negara bagian dalam sistem mengadopsi norma tersebut. Tantangan di tahap ini sulitnya untuk memprediksi dengan tepat berapa banyak negara yang harus menerima suatu norma untuk "mencapai tip" pada proses tersebut, karena negara tidak sama dalam hal bobot normatif (Finnemore & Sikkink, 1998).

Perbedaan respons negara terhadap norma internasional dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti tekanan internasional, perubahan pemerintahan, pergeseran opini publik, atau perubahan kepentingan nasional dapat mempengaruhi keputusan negara. Jadi, pengadopsian norma dan keputusan negara tergantung pada sejumlah faktor, dan dapat bervariasi antara satu isu dan isu lainnya. Norma-norma internasional seringkali mencerminkan usaha bersama komunitas internasional untuk mencapai tujuan bersama, tetapi negara-negara akan meresponnya dengan cara yang sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai mereka sendiri (Finnemore & Sikkink, 1998).

Negara juga bisa menjadi "kritis" karena mereka memiliki pengaruh moral tertentu. Sebagai contoh, ketika Nelson Mandela memimpin Afrika Selatan,

keputusannya untuk mendukung perjanjian larangan ranjau darat sangat mempengaruhi, terutama di Afrika dan di seluruh dunia. Meskipun ada beberapa negara yang sangat penting untuk mendukung perjanjian itu, tidak perlu ada kesepakatan bulat di antara mereka. Misalnya, meskipun Amerika Serikat awalnya mendukung larangan ranjau darat, mereka akhirnya menarik dukungannya, tetapi norma tersebut tetap berlaku (Ramirez, Soysal, & Shanahan, 197).

**c. *Norms Cascade* (Penyebaran Norma)**

*Norms cascade* merupakan proses norma-norma baru atau perubahan dalam norma-norma yang ada menjadi diterima oleh aktor-aktor internasional karena pengaruh lembaga-lembaga internasional dan norma-norma global yang berkembang. Perubahan dalam norma-norma tersebut diawali dengan adopsi oleh kelompok kecil aktor internasional atau lembaga-lembaga tertentu. Kemudian, melalui proses penyebaran, norma-norma ini mulai diterima oleh aktor-aktor lainnya, dan pada akhirnya, norma-norma tersebut menjadi norma global yang diterima oleh banyak aktor internasional. Proses ini seringkali memerlukan waktu dan usaha yang cukup lama, tetapi bisa memiliki dampak besar dalam mengubah cara negara-negara dan aktor internasional berperilaku dalam sistem internasional (Finnemore M. , 1996).

Menurut Ramirez dkk proses ini terjadi setelah titik kritis membuat sedikit perubahan normatif tanpa adanya gerakan domestik yang mendukung perubahan. Setelah titik kritis tercapai, Dinamika yang terjadi yaitu akan lebih banyak negara mulai mengadopsi norma-norma baru dengan lebih cepat bahkan tanpa tekanan domestik untuk melakukan perubahan. Pada titik ini, sering kali terjadi demonstrasi internasional dan regional atau "penularan" terjadi dimana norma yang

mempengaruhi menjadi lebih penting daripada politik domestik dalam mempengaruhi perubahan norma (Ramirez, Soysal, & Shanahan, 197).

Mekanisme utama mempromosikan *cascade norm* adalah proses sosialisasi internasional yang aktif dengan tujuan untuk mendorong para pelanggar norma untuk menjadi pengikut norma. Menurut Kenneth Waltz terdapat beberapa cara sosialisasi yang terjadi: peniruan (terhadap pemimpin norma), pujian (untuk perilaku yang sesuai dengan norma kelompok), dan cemoohan (untuk penyimpangan). Dalam konteks politik internasional, sosialisasi melibatkan pujian atau kecaman diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, yang diperkuat dengan sanksi dan insentif material (Waltz, 1979).

Jaringan-jaringan pengusaha norma dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan menekan aktor yang ditargetkan untuk mengadopsi kebijakan dan hukum baru dan untuk meratifikasi perjanjian dan dengan memantau kepatuhan terhadap standar-standar internasional. Dengan demikian, sosialisasi merupakan mekanisme dominan dari sebuah *norms cascade* dengan mekanisme yang melalui para pemimpin norma membujuk orang lain untuk mematuhi. Menurut Finnemore berpendapat bahwa negara mematuhi norma pada tahap dua karena alasan-alasan yang berhubungan dengan identitas mereka sebagai anggota masyarakat internasional. Karena pengakuan bahwa identitas negara pada dasarnya membentuk perilaku negara, dan kemudian setelah itu dibentuk oleh konteks budaya kelembagaan di mana negara bertindak (Waltz, 1979) (Finnemore & Sikkink, 1998)

Pada titik kritis cukup banyak negara-negara kritis yang mendukung norma baru untuk perilaku yang sesuai untuk identitas yang disebut "negara" atau beberapa

bagian yang relevan dari negara. Menurut Fearon dari Finnemore untuk mengetahui sejauh mana negara dan elit negara membentuk diri atau identitas politik dalam kaitannya dengan komunitas internasional, konsep sosialisasi menunjukkan bahwa efek kumulatif dari banyak negara di suatu wilayah yang mengadopsi norma-norma baru dapat dianalogikan dengan “*peer pressure*” diantara negara-negara (Finnemore & Sikkink, 1998).

Tiga motivasi yang mungkin untuk menanggapi “*peer pressure*” adalah legitimasi, konformitas, dan penghargaan. Legitimasi penting bagi negara dan dapat diakui peran legitimasi sebagai sumber-sumber internasional dalam membentuk perilaku negara. Finnemore berpendapat bahwa negara juga peduli dengan legitimasi internasional. Kepedulian ini karena legitimasi internasional menjadi kontributor penting bagi persepsi legitimasi domestik yang dipegang oleh warga negara itu sendiri. Legitimasi domestik adalah keyakinan bahwa institusi politik yang ada lebih baik daripada alternatif lain dan oleh karena itu layak untuk dipatuhi (Linz, 1978).

Selain itu, Legitimasi domestik penting karena mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan hukum pemerintah. Memerintah dengan kekerasan saja hampir tidak baik dan efisien untuk dilakukan. Dengan demikian, legitimasi internasional penting sejauh kembali pada dasar legitimasi domestik pemerintah dan persetujuan dari dalam negeri dan dengan demikian pada akhirnya pada kemampuannya untuk tetap berkuasa. Dinamika ini adalah merupakan bagian dari penjelasan transisi rezim di Afrika Selatan, Amerika Latin, dan Eropa Selatan. (Klotz, 1995)

Konformitas dan penghargaan melibatkan hubungan evaluatif antara negara-negara dan *state peers* mereka. Menurut Robert Axelrod Konformitas melibatkan social proof atau bukti sosial negara mematuhi norma-norma untuk menunjukkan bahwa mereka telah beradaptasi dengan lingkungan sosial dan memberikan tanda bahwa mereka termasuk dalam lingkungannya. Seperti dengan analogi menyesuaikan diri dengan tindakan orang-orang di sekitar kita, memenuhi kebutuhan psikologis untuk menjadi bagian dari suatu kelompok (Axelrod, 1986).

Harga diri terkait dengan konformitas dan legitimasi. konformitas dan legitimasi, tetapi lebih dalam lagi, karena hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara kadang-kadang mengikuti norma karena mereka ingin orang lain berpikir baik tentang mereka, dan mereka ingin berpikir baik tentang diri mereka sendiri. Norma-norma sosial ditopang, sebagian, oleh "perasaan malu, cemas, bersalah, dan malu yang diderita seseorang (Fearon, 1997).

Konformitas dan legitimasi terkait erat dengan harga diri. Keterkaitan ini karena kedua hal tersebut menunjukan bahwa para pemimpin negara biasanya mengikuti norma karena ingin mendapat pandangan baik oleh orang lain serta ingin menganggap dirinya baik (Elster, 1989). Norma-norma sosial dibangun sebagian dari perasaan malu, bersalah, dan cemas. Oleh karena itu, Fearon berpendapat bahwa identitas seseorang bergantung pada aspek diri yang menjadi sumber kebanggaan khusus atau harga diri (Fearon, 1997). Dorongan untuk mempertahankan atau mendapatkan kebanggaan atau harga diri ini dapat menjelaskan keberadaan norma dalam masyarakat.

#### **d. *Norms Internalization* (Internalisasi Norma)**

Internalisasi merupakan titik ekstrim dari sebuah *cascade norma*, norma-norma dapat menjadi diterima secara luas sehingga diinternalisasi oleh para aktor dan mencapai kualitas "diterima begitu saja" yang membuat kepatuhan terhadap norma menjadi hampir secara otomatis. Maka dari itu, norma-norma yang terinternalisasi dapat menjadi sangat kuat karena perilaku yang sesuai dengan norma tidak dipertanyakan dan sulit untuk dilihat karena para aktor tidak secara mempertimbangkan atau mendiskusikan apakah akan menyesuaikan diri (Finnemore & Sikkink, 1998).

Aktor yang terlibat pada tahap ini adalah profesi yang berfungsi sebagai agen yang kuat dan mendalam yang bekerja untuk menginternalisasi norma-norma diantara para anggotanya. Mekanismenya yaitu pelatihan profesional termasuk mentransfer pengetahuan teknis dan yang paling berpengaruh yaitu pelatihan secara aktif mensosialisasikan orang untuk menghargai hal-hal tertentu di atas yang lain. Misalnya para pembuat kebijakan negara birokrasi dan organisasi internasional telah menjadi semakin banyak profesionalisasi selama abad ke-20 dengan harapan untuk melihat kebijakan yang semakin berkurang dari bias-bias normatif dari profesi-profesi yang menjadi staf lembaga-lembaga pembuat keputusan (Finnemore & Sikkink, 1998). Sejumlah studi empiris telah mendokumentasikan peran norma-norma yang sangat terinternalisasi yang dipegang oleh para profesional yang menentukan kebijakan (Burley, 1993).

Mekanisme berupa perilaku dan kebiasaan yang berulang-ulang berkontribusi terhadap universalitas norma setelah tahap *cascade norma*. Para ilmuwan politik telah memahami kekuatan mekanisme ini selama bertahun-tahun, tetapi belum

menghubungkannya secara teoritis dengan perdebatan tentang norma dan konstruksi sosial. Meskipun begitu, pada argumen neo-fungsionalis tentang integrasi di Eropa bahwa interaksi yang sering di antara orang-orang yang melibatkan kerja bersama dalam tugas-tugas teknis akan pada akhirnya akan menciptakan prediktabilitas, stabilitas, dan kebiasaan saling percaya. Ketika kepercayaan menjadi kebiasaan, maka kepercayaan akan terinternalisasi dan kepercayaan yang terinternalisasi, pada gilirannya, akan pengaruh di antara para peserta. Pengaruh yang berubah berarti perubahan identitas dan perubahan norma-norma yang berubah karena empati dan identifikasi dengan orang lain bergeser. Dengan demikian, mesin integrasi bersifat tidak langsung dan evolusioner (Finnemore & Sikkink, 1998).

Integrasi bersifat tidak langsung dan evolusioner. Alat-alat diplomatik seperti pembangunan kepercayaan langkah-langkah dan diplomasi jalur dua mungkin mengikuti logika yang sama. Alat-alat diplomatik seperti pembangun kepercayaan dan diplomasi Jalur Dua adalah elemen penting dalam diplomasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan dialog, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat hubungan antar-negara. Secara umum, argumen ini menunjukkan bahwa rute menuju perubahan normatif mungkin juga bersifat tidak langsung dan evolusioner.

Perubahan prosedural yang menciptakan proses politik baru dapat mengarah pada perubahan konvergensi normatif, ideasional, dan politik yang tidak disengaja (Rosenau, 1986). Dalam rangkaian ini, norma-norma internasional diinternalisasikan melalui proses yang mencakup pengaruh sosial, perjanjian formal, sanksi moral, penyebaran informasi, dan perubahan praktik. Ini membantu

menjelaskan bagaimana norma-norma internasional menjadi lebih diterima dan dihayati oleh negara-negara dan aktor-aktor internasional di arena internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Menurut Martha Finnemore motivasi untuk internalisasi norma-norma internasional menjadi elemen sentral. Menyoroti peran penting motivasi dalam proses di mana negara-negara atau aktor-aktor internasional menginternalisasikan norma-norma tertentu. Terdapat tiga jenis motivasi utama yang dijelaskan dalam teori *norms life cycle*. Kepentingan (*interest*) menjadi salah satu motivasi utama dalam internalisasi norma adalah ketika norma tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan nasional atau kepentingan sekelompok aktor tertentu. Ketika norma-norma internasional mendukung atau mempromosikan kepentingan-kepentingan maka negara-negara atau aktor-aktor internasional lebih mungkin untuk mengadopsi dan menginternalisasikan norma-norma tersebut. Motivasi kepentingan dapat mendorong tindakan yang mendukung norma-norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dalam teori *norms life cycle*, motivasi untuk internalisasi norma-norma internasional dapat bervariasi antara aktor-aktor internasional dan sepanjang waktu. Hal ini mencerminkan bahwa faktor-faktor seperti perubahan dalam norma internasional, perubahan dalam kepentingan nasional, atau perubahan dalam tindakan dan pandangan etis dapat memengaruhi bagaimana norma-norma tersebut diterima dan diinternalisasikan oleh aktor-aktor internasional. Motivasi ini berperan dalam menggambarkan bagaimana norma-norma internasional berkembang sepanjang waktu. Jadi, motivasi aktor melakukan internalisasi adalah *conformity* atas perubahan yang terjadi (Finnemore & Sikkink, 1998).

Menurut Finnemore terdapat waktu pencarian ide-ide dan norma-norma baru dapat terjadi di peristiwa-peristiwa sejarah dunia. Ketika suatu pihak kalah perang atau dianggap telah menyebabkan kegagalan ekonomi akan berhadapan dengan resiko dipojokkan dan mulai dari itu alternatif baru terbuka. Berdasarkan hal tersebut Perang Dunia Kedua menjadi tempat perkembangan norma dan waktu konsolidasi yang besar berdasarkan prinsip koalisi yang menang dalam perang (Finnemore & Sikkink, 1998).

Selain itu Finnemore berargumen bahwa periode globalisasi sebagai periode yang mendorong perluasan dramatis norma-norma baru dan menciptakan peluang baru bagi para pengusaha norma. Meskipun norma-norma selalu menjadi bagian dari kehidupan internasional, perubahan dalam teknologi komunikasi dan transportasi dan meningkatnya saling ketergantungan global telah menyebabkan peningkatan keterhubungan dan, di satu sisi, mengarah pada homogenisasi norma-norma global. Perluasan organisasi internasional (terutama dengan PBB) berkontribusi terhadap proses percepatan ini dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk membahas dan bernegosiasi mengenai berbagai masalah normatif (Finnemore & Sikkink, 1998).

### **C. GI (*Green Investment*)**

*GI menurut IMF dari Eyraud merujuk secara luas pada investasi rendah karbon dan tahan iklim rendah karbon yang dilakukan di perusahaan, proyek, dan instrumen keuangan yang beroperasi terutama di energi terbarukan, teknologi bersih, teknologi lingkungan atau pasar yang terkait dengan keberlanjutan sebagai serta investasi yang spesifik terhadap perubahan iklim." (OECD, 2012)*

IMF melalui *Working Paper* Eyraud et. al. (2011) berpendapat bahwa GI sebagai investasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara, tanpa secara signifikan mengurangi produksi dan konsumsi barang

non-energi. Ruang lingkup dari investasi ini adalah investasi publik dan swasta. Komponen utama dari investasi terdiri dari tiga yaitu: Pasokan energi rendah emisi (termasuk energi terbarukan, bahan bakar nabati dan nuklir); dan penangkapan dan penyerapan karbon (termasuk deforestasi dan pertanian); efisiensi energi (di sektor penyediaan energi dan sektor yang mengkonsumsi energi) (Inderst, Kaminker, & Stewart, 2012)

GI memiliki beberapa jenis investasi. Jenis investasinya yaitu Ekuitas Hijau (*Green Equities*), Obligasi Hijau (*Green Bonds*), Dana Hijau (*Green Funds*), *Green Private Equity and Green Infrastructure*. Membeli saham di perusahaan merupakan GI yang paling sederhana. Membeli perusahaan yang memiliki komitmen lingkungan yang kuat. Seperti, perusahaan rintisan baru yang berusaha mengembangkan energi dan material alternatif, dan bahkan pemain tradisional pun membuat taruhan yang cukup besar untuk masa depan rendah karbon. Seperti perusahaan, seperti Tesla (TSLA), mampu mencapai valuasi miliaran dolar dengan menargetkan konsumen yang sadar lingkungan (Chen, 2022).

Investasi yang kedua yaitu berinvestasi dalam obligasi hijau. Dikenal dengan istilah obligasi iklim, sekuritas berpendapatan tetap ini merupakan pinjaman untuk membantu bank, perusahaan, dan badan pemerintah mendanai proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan. Menurut *Climate Bonds Initiative*, sekitar \$ 1,1 triliun obligasi hijau baru diterbitkan pada tahun 2021. Obligasi ini juga dapat disertai dengan insentif pajak, sehingga menjadi investasi yang lebih menarik dibandingkan dengan obligasi tradisional.

Ketiga yaitu dengan berinvestasi pada saham reksa dana, ETF, atau reksa dana indeks yang memberikan eksposur yang lebih luas kepada perusahaan-

perusahaan hijau. Dana hijau ini berinvestasi pada sekumpulan sekuritas yang menjanjikan, sehingga investor dapat menyebarkan uang mereka pada berbagai proyek lingkungan hidup yang terdiversifikasi, bukan hanya pada satu saham atau obligasi. (Chen, 2022)

Kelas aset alternatif adalah label untuk investasi yang berada di luar kendaraan pembiayaan tradisional, seperti ekuitas publik, pendapatan tetap, dan real estat. Kelas alternatif yang paling banyak diketahui yaitu ekuitas swasta, infrastruktur, dana lindung nilai, komoditas, kayu dan tanah, mata uang, dan strategi hamparan alokasi aset taktis. Sedangkan dua kelas aset yang paling penting dalam GI adalah ekuitas swasta dan infrastruktur. Perkembangan pesat terjadi pada Ekuitas swasta dan infrastruktur hijau terkhususnya untuk perusahaan energi terbarukan dan teknologi bersih.

Kennedy (2011) memberikan definisi yang lebih rinci tentang infrastruktur hijau. Hal ini dapat didefinisikan dalam dua dimensi, yaitu rendah karbon dan ketahanan iklim:

*"Pembangunan infrastruktur rendah karbon dan tahan iklim mencakup pembangunan (dan pembangunan kembali) bangunan, energi, transportasi, sistem limbah dan air untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global secara substansial, dan secara bersamaan membuat sistem-sistem tersebut, dan masyarakat yang dilayaninya, menjadi lebih mudah beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut."*

*"Infrastruktur rendah karbon tidak hanya dipahami sebagai struktur yang dibangun dari bahan rendah karbon, tetapi juga sebagai sistem infrastruktur fisik penting yang mendukung pembangunan masyarakat rendah karbon. Contoh infrastruktur rendah karbon meliputi pembangkit listrik energi terbarukan dan/atau sistem energi terbarukan terdistribusi, fasilitas pengolahan limbah menjadi energi, bangunan berenergi rendah, sistem transportasi yang mendukung kendaraan dan moda transportasi rendah emisi."*

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik bahwa infrastruktur hijau atau rendah karbon pembangunan yang tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, Selain itu investasi ini dikenal sebagai sistem infrastruktur yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat rendah karbon. Pembangkit listrik energi terbarukan, sistem energi terbarukan pengolahan sampah menjadi energi, bangunan dan moda transportasi rendah emisi.

Karbon rendah, sedang dan tinggi didefinisikan dalam istilah kuantitatif emisi gas rumah kaca (GRK) untuk sektor-sektor berikut: 1) Pasokan listrik (hidro, nuklir angin, tenaga surya, biomassa, CCS, gas alam, minyak, batu bara, lignit); 2) Pengoperasian bangunan (konsumsi energi termasuk pencahayaan dan pemanasan); 3) Sistem transportasi (penumpang dan barang); 4) Pengelolaan limbah. Ketahanan iklim didefinisikan dalam hal infrastruktur baru, perbaikan dan kurangnya infrastruktur. Dalam praktiknya, para investor mulai memperhitungkan faktor perubahan iklim dalam infrastruktur. Laporan PRI baru-baru ini menyajikan contoh bagaimana manajer aset dan dana pensiun mengintegrasikan ESG ke dalam investasi infrastruktur yang terdaftar dan tidak terdaftar (Principles for Responsible Investment, 2011).

Ekuitas swasta adalah kendaraan investasi yang umum untuk mengembangkan teknologi hijau, dan kelas aset ini dilihat sebagai titik awal yang alami untuk GI. Mengingat pentingnya infrastruktur bagi perekonomian dan masyarakat, infrastruktur memiliki konotasi yang kuat terhadap perubahan iklim dan tema-tema hijau lainnya. Khususnya dalam infrastruktur, yang utama yaitu untuk tidak mengecualikan fasilitas transportasi, energi, atau komunikasi yang terkait dengan

definisi “hijau”. Infrastruktur bekerja dengan konsep kontribusi terhadap efisiensi energi, pembangunan rendah emisi, serta adaptasi dan ketahanan iklim (Holm, 2010).

Menurut Chitmea dkk. GI benar-benar terbayar jika skenario jangka panjang dipertimbangkan. Pengembalian modal mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi efeknya sangat menguntungkan bagi entitas swasta dan publik. Terkait dengan sisi praktis dari penelitian ini, terdapat bukti yang jelas bahwa dengan mengetahui faktor pendorong GI, entitas yang peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan polusi, dapat memanfaatkannya dalam praktik dan mendorong GI untuk mengendalikan dampak-dampak tersebut.

Perkembangan keadaan dunia saat ini mengakibatkan keharusan untuk untuk berinvestasi hijau. GI membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah karena tanpa kebijakan dan insentif yang sesuai, perusahaan akan tergoda untuk memilih investasi yang merusak lingkungan seperti bahan bakar fosil karena jangka waktu pengembalian modal yang panjang terkait dengan GI. Instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh otoritas publik untuk menstimulasi GI adalah jaminan kredit, penurunan pajak yang dibayarkan, hibah yang ditawarkan untuk mendapatkan teknologi hijau, dan kursus gratis tentang pentingnya GI yang didedikasikan untuk organisasi swasta (Chitimia, Minciu, Mariana Manta, Ciociu, & Veith, 2021).

Selain itu, GI secara tradisional sebagian besar tertanam dalam dan lebih luas dalam pendekatan investasi ESG dan Investasi Bertanggung Jawab Sosial (*Socially Responsible Investing/SRI*). Ada dua sisi penting dari pendekatan tersebut. Ketika GI masuk melalui pintu SRI atau ESG maka investasi ini tidak secara khusus

berfokus pada GI atau perubahan iklim. Penyebabnya karena ada faktor-faktor lain yang berperan dalam keputusan investasi. Kedua, SRI/ESG paling populer sebagai proses "pelapisan" terhadap kebijakan standar tanpa menargetkan aset hijau tertentu. Ketiga, proses ini dapat dengan mudah merosot menjadi semacam keharusan untuk mencentang kotak untuk alasan kepatuhan atau pemasaran (Chen, 2022).

ESG adalah strategi bisnis (atau pendekatan) yang digunakan untuk mengevaluasi risiko keuangan, keberlanjutan jangka panjang, dan kemajuan menuju tujuan suatu organisasi dalam tiga area kinerja yang terukur yaitu Lingkungan (*Environment*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola (*Governance*). Area pertama yaitu terkait dengan Lingkungan. Fokus ESG yaitu pada dampak langsung dan tidak langsung yang dimiliki organisasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Kedua yaitu sosial yang fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu organisasi terhadap tenaga kerja langsung, pekerja dalam rantai pasokan, dan masyarakat di mana organisasi tersebut beroperasi. Ketiga yaitu Tata kelola: Struktur kepemimpinan suatu organisasi dan kebijakan serta prosedur yang berlaku untuk beroperasi dengan cara yang etis, termasuk pengelolaan dampak terhadap manusia dan lingkungan (Anteagroup, 2022).

ESG memiliki perbedaan dengan ESG dan SRI yaitu ESG adalah ukuran obyektif dari perilaku lingkungan, sosial, dan tata kelola suatu organisasi, sedangkan SRI adalah kriteria subyektif yang digunakan oleh investor untuk menilai tanggung jawab sosial suatu organisasi. Kedua strategi investasi ini dapat digunakan secara bersamaan untuk mengoptimalkan investasi pada organisasi yang bertanggung jawab secara sosial yang memiliki potensi hasil yang lebih besar.

ESG dapat digunakan untuk menciptakan nilai. Terutama bagi perusahaan yang menjajaki ESG akan berpotensi untuk menciptakan nilai. Penerapan strategi ESG secara sukarela, memprioritaskan risiko dan upaya mitigasi, serta menciptakan kerangka kerja untuk kesuksesan ESG di masa depan, memberikan masukan ke organisasi atau perusahaan akan memiliki nilai tambah di mata investor (Anteagroup, 2022). Manfaat kebijakan ESG dapat membantu investor untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini dapat mendorong investor untuk mengalokasikan lebih banyak modal ke aset-aset yang mendukung upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

Meskipun begitu, terdapat beberapa bidang yang masih menjadi kontroversi dalam hal pengkategorian sebagai GI. Misalnya, nuklir, bahan bakar nabati, biomassa, gas serpih, pertanian "hijau", TI, dan jasa keuangan. Selain itu, terdapat beberapa bidang yang penting untuk lingkungan tetapi belum selalu diperhitungkan dalam GI, seperti reboisasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Definisi GI harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang relevan (Chen, 2022).

Selain hambatan-hambatan utama tersebut, GI yang dilakukan oleh para pelaku usaha juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya transaksi yang tinggi, pengetahuan informasi, kesenjangan dalam hal kepercayaan, kurangnya partisipasi dari organisasi internasional, nilai aset yang masih ada yang harus diganti, biaya yang tinggi untuk mengintegrasikan sumber-sumber energi bersih ke dalam sistem, risiko politik dan peraturan, hak-hak kepemilikan, ketidakjelasan hak kekayaan intelektual, tidak lengkapnya instrumen keuangan dalam negeri, dan lain sebagainya (Hoen, 2014).

*Active Ownership* adalah penggunaan hak dan posisi kepemilikan untuk mempengaruhi aktivitas atau perilaku perusahaan investasi. *Active Ownership* dapat diterapkan secara berbeda di setiap kelas aset. Keterlibatan ekuitas mencakup aktivitas keterlibatan dan kegiatan *voting*. Keterlibatan pemegang saham mencakup interaksi antara investor dan perusahaan investasi saat ini atau yang berpotensi menjadi perusahaan investasi dan strategi yang relevan, dengan tujuan meningkatkan (atau mengidentifikasi kebutuhan untuk mempengaruhi) praktik-praktik ESG dan/atau meningkatkan pengungkapan ESG. Ini melibatkan proses terstruktur yang mencakup dialog dan terus memantau perusahaan. Interaksi ini dapat dilakukan secara individual atau bersama-sama dengan investor lain (Principles for Responsible Investment, 2018).

Keterlibatan kolaboratif mencakup kelompok investor yang bekerja sama, dengan atau tanpa keterlibatan investor formal jaringan atau organisasi keanggotaan lainnya. Pemungutan suara mengacu pada pelaksanaan hak suara pada manajemen dan/atau resolusi pemegang saham untuk secara resmi menyatakan persetujuan (atau persetujuan (atau ketidaksetujuan) atas hal-hal yang relevan. Dalam praktiknya, hal ini termasuk mengambil tanggung jawab atas cara pemungutan suara pada topik yang diangkat oleh manajemen, serta mengajukan resolusi sebagai pemegang saham untuk pemegang saham lain untuk memberikan suara (dalam yurisdiksi yang memungkinkan). Pemungutan suara dapat dilakukan secara langsung, selama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau melalui kuasa (Nordea, 2022).

### **C. Penelitian Terdahulu terkait dengan SWF Norwegia dan *Climate risk***

Pada skripsi ini penulis akan menjelaskan lebih terkait dengan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan SWF Norwegia dan *Climate risk* terutama di Eropa barat. Hal ini dilakukan agar penulis mendapat informasi dan referensi lebih serta pembeda dari penelitian sebelumnya. Lebih spesifiknya penelitian akan membahas mengenai pengaruh SWF dalam Investasi di Luar negeri sekaligus dalam negeri kemudian menjelaskan penelitian terkait usaha aktor internasional dalam menghadapi *Climate risk*.

Penelitian pertama berjudul “*Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*”. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk membawa a pemahaman yang lebih baik tentang fenomena kedaulatan dana kekayaan (SWF) dengan menangani definisinya masalah. Tujuan penelitian adalah untuk memahami mengapa hal itu terjadi sulit untuk memiliki definisi standar dan umum SWF dan bagaimana definisi ini dapat disajikan masalah, khususnya untuk penelitian akademis. Penelitian ini menganalisis sejarah SWF, tujuan penciptaannya, sumbernya pendanaan, kinerja investasi mereka dan mereka struktur pemerintahan dan membandingkannya dengan jenis lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya definisi umum terutama berasal dari: i) sifat hibrida: SWF diciptakan dan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi investasi mereka strateginya serupa dengan dana swasta; ii) tinggi heterogenitas: SWF memiliki struktur, sumber yang berbeda pendanaan dan tujuan penciptaan lainnya; iii) kekurangan transparansi. Meskipun didirikan Umumnya Prinsip dan Praktik yang Diterima untuk SWF dikenal sebagai Prinsip Santiago, struktur SWF tetap buram dan iv) kesamaan dengan investor negara dan swasta

lainnya, terutama dalam strategi investasi mereka. Definisi ini masalah bisa menjelaskan kurangnya konsensus empiris studi tentang SWF dan isu-isu tentang regulasi aktivitas mereka. Jika tidak, penelitian ini menargetkan untuk berkontribusi terhadap perdebatan global mengenai regulasi transaksi mereka, pada dasarnya dengan memperjelas perbedaan halus mereka dengan orang lain kendaraan investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, SWF telah menjadi pemain penting di pasar keuangan internasional. SWF terus menjadi berita utama karena mereka aset besar dan jumlahnya terus bertambah. Misalnya, GPFG yang merupakan SWF terbesar. Maka dari itu, akademisi dan regulator pasar semakin tertarik untuk meninjaunya investasi SWF. Memang benar, investasi SWF bisa meningkatkan tingkat risiko karena transaksi mereka dapat dimotivasi oleh tujuan politik dan bukan tujuan ekonomi. Meskipun terjadi peningkatan menarik, SWF disalahpahami. Mereka tidak memiliki definisi yang standar dan diterima secara universal. Oleh menganalisis sejarah, struktur, dan kekhususannya, menyimpulkan bahwa kurangnya definisi standar disebabkan oleh SWF sifatnya hybrid, heterogenitas struktur, kurangnya transparansi, dan kesamaannya dengan negara lain dan swasta investor seperti badan usaha milik negara atau dana pensiun. Karena permasalahan definisi ini, ada empiris penelitian didasarkan pada ukuran sampel yang berbeda, nilai yang berbeda SWF, dan nilai serta jumlah kesepakatan mereka yang berbeda, yang menjelaskan perbedaan dalam hasil studi empiris.

Jadi, kita belum bisa menyimpulkan secara pasti motif mereka dan dampak. Semua masalah ini juga dapat menjadi perhatian pasar regulator yang mencoba mengatur investasi mereka. Makalah ini menggarisbawahi permasalahan dalam

mendefinisikan SWF dan kami seruan untuk mempertimbangkan heterogenitas dana ini, yang akan membantu akademisi dan regulator pasar untuk memeriksa dan mengatur penanaman modal kendaraan negara tersebut. Itu Diagram berikut merangkum isi makalah ini

Penelitian kedua berjudul “*The Norwegian Oil Fund in a Warming World: What are the Interests of Future Generations?*”. Pada penelitian ini dibahas mengenai kepentingan penggunaan dana GPFG masa kini dan masa yang akan datang. Masalahnya muncul permasalahan perubahan iklim dan permasalahan pengurangan emisi gas sejalan dengan Perjanjian Paris. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai perlunya visi financial dan non financial generasi sekarang dan yang akan datang serta membahas perlunya peran musyawarah dalam kepentingan diatas.

Penelitian ini membahas mengenai sejarah sejak pertama kali menemukan minyak, para pembuat kebijakan di Norwegia telah menghadapi serangkaian *trade-off* dan penilaian nilai. Pertama, menghindari *resource curse* dan kemudian memastikan kekayaan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Norwegia secara tradisional dianggap sebagai contoh pengelolaan minyak yang efektif; namun, perubahan iklim telah menguji reputasi ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kepentingan generasi mendatang, yang dimaksudkan penerima Dana Minyak, dimasukkan ke dalam kebijakan minyak Norwegia.

Premis panduan dari penelitian ini GPFG memaksimalkan nilai finansial adalah demi kepentingan terbaik generasi mendatang belum dikaji ulang secara serius sehubungan dengan perubahan iklim. Perundingan nasional dengan

masyarakat para pemilik dana minyak dapat mendukung usaha memaksimalkan financial dana minyak melalui para pembuat kebijakan mendetoksifikasi isu politik yang seringkali menimbulkan polarisasi. Keterlibatan pemilik dana memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan legitimasi rakyat dan membantu menentukan pembagian yang adil bagi Norwegia berdasarkan Perjanjian Paris.

Penelitian ketiga berjudul “*The Norwegian Government Pension Fund Global. Risk Based Versus Ethical Investments*”. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya akses terhadap pendanaan jika ingin mencapai transisi mendasar pada zaman ini agar dapat mengamankan masyarakat yang aman dan adil di dunia. Di era kapitalisme pasar global dan deregulasi, SWFs menawarkan salah satu dari sedikit lembaga ekonomi publik yang mampu melakukan penyuntikan nilai-nilai ekologi dan sosial ke dalam pasar global. Penelitian ini melakukan studi kasus salah satu SWF terbesar di dunia, yaitu GPF. Dana ini terkenal dengan Pedoman Etika (*Ethical Guidelines*) yang merekomendasikan pengecualian perusahaan berdasarkan produk dan perilaku serta pernyataan publik ketika menarik diri dari perusahaan.

Permasalahan, dasar etika konsensus yang tumpang tindih menyebabkan respons terhadap opini publik dan kontroversi media ketika mempertimbangkan divestasi, dibandingkan melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Selain itu, dan belum banyak diketahui, lebih banyak perusahaan yang dikeluarkan dari dana karena risiko keuangannya terhadap portofolio daripada berdasarkan Pedoman Etika. Maka dari itu penelitian ini membahas tentang dasar kedua pedoman etika dan manajemen risiko keuangan portofolio. Namun, sebagian besar investasi dana adalah berada pada jalur 'bisnis seperti biasa' yang tidak berkelanjutan. Tesis utama

penelitian ini adalah paradoks bahwa semakin banyak perusahaan menjadi tidak berkelanjutan, maka dari itu, pentingnya penilaian risiko keuangan meningkat dan relevansi Pedoman Etika menurun.

Mandat dana mengintegrasikan keberlanjutan dalam kerangka pengelolaannya portofolio investasi. Ada beberapa tanda positif yang dapat difasilitasi oleh penilaian risiko keuangan yang terintegrasi praktik investasi bertanggung jawab ke dalam pengelolaan dana. Namun, sisi positifnya kecenderungannya terlalu bertahap dan menggambarkan kurangnya penyaringan negatif, seperti yang ditunjukkan antara lain melalui reaksi dana terhadap perubahan iklim. Sementara dana sendiri mungkin hanya sekedar menyentuh dengan adanya perubahan bertahap dalam portofolio investasinya, maka GPFG mempunyai kapasitas untuk menjadi katalisator yang lebih luas perubahan seperti yang terlihat pada meningkatnya gerakan divestasi bahan bakar fosil yang telah memberikan manfaat publisitas yang diberikan terhadap upaya dana baru-baru ini untuk mengurangi kepemilikannya di perusahaan pertambangan batubara (Carrington 2015). Untuk mewujudkan potensi ini dan menjadi yang terdepan, perubahan diperlukan Mandat dan pengelolaan Dana.

GPFG adalah salah satu dari sedikit aktor yang terlibat dalam hal kekuatan finansial dan profil global untuk memanfaatkan perubahan positif. Meskipun untuk memanfaatkan ini memerlukan keberanian dan kemauan politik. Dengan diadopsinya *UN Sustainable Development Goals* dan Perjanjian Paris tahun 2015 menciptakan dorongan baru dalam perdebatan perubahan positif. Maka dari itu, perlu perubahan mandat untuk memungkinkan investasi pada infrastruktur terbarukan,

Permasalahannya akankah terus berada di jalur perbaikan bertahap atau apakah perubahan mandat akan menjadi kenyataan awal dari perubahan mendasar yang diperlukan. Sebuah titik awal untuk hal mendasar yang diperlukan peralihannya adalah berhenti membahas keberlanjutan sebagai persoalan etika dibandingkan ekonomi dan mengakui hal tersebut pembangunan ekonomi seperti hal lainnya bergantung pada pemeliharaan integritas negara lingkungan

Jika terdapat kemauan politik untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna memastikan kontribusi dana keberlanjutan, dan dengan demikian potensi dana untuk terus memberikan imbal hasil yang baik dalam jangka panjang. Maka dari itu, serangkaian reformasi yang lebih luas perlu diterapkan. Investasi berkelanjutan membutuhkan hal-hal positif penyaringan atau investasi berdampak, yang memerlukan perubahan Mandat, dan penghapusan atau nuansa perintah untuk tetap berinvestasi secara luas di dunia investasi. Pendekatan dari dana perlu diubah dari investasi yang bertanggung jawab dalam tujuan setinggi mungkin pengembalian yang baik dalam investasi yang benar-benar bertanggung jawab dalam keberlanjutan.

Menurut penelitian ini divestasi berbasis risiko NBIM harus mengambil manfaat terbaik dari praktik Dewan Etik dan mengumumkan divestasinya kepada publik. Melakukan hal tersebut dengan justifikasi berdasarkan risiko karena masalah ESG dapat berkontribusi pada posisi dana sebagai pemimpin pasar dalam GI. Dengan kekuatan finansial dan visibilitas internasionalnya, dana mempunyai potensi untuk mengubah arah investasi global, yang sangat signifikan, dan juga berpotensi menjadi fasilitator untuk reformasi lainnya.

Meskipun dana dibatasi untuk memiliki maksimal sepuluh persen saham di perusahaan manapun, IMF mempunyai struktur kepemilikan saham yang sangat tersebar di banyak perusahaan dan merupakan investor yang relatif besar. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh, dengan reputasinya sebagai standar utama dalam investasi yang bertanggung jawab. Inilah saatnya memanfaatkan pengaruh dana sebelum keuntungan dari kepercayaan standar emas memudar.